

**PENGARUH KAPASITAS APARATUR TERHADAP
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI KECAMATAN WONGGARASI KABUPATEN POHUWATO)**

OLEH

RAHMAWATI LADIKU

NIM : S.2116104

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH KAPASITAS APARATUR TERHADAP
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI KECAMATAN WONGGARASI KABUPATEN POHUWATO)


OLEH

RAHMAWATI LADIKU

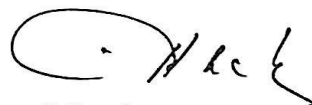
NIM : S.2116104

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 16 Maret 2020

Pembimbing I

Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si

Pembimbing II

H. Umar Sune, S.Sos., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGARUH KAPASITAS APERATUR TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA(STUDY DI KANTOR CAMAT WONGGARASI KABUPATEN POHUWATO)

OLEH

RAHMAWATI LADIKU

NIM : S.2116104

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir

Hari/Tanggal, Jember.....2020

Komisi Penguji :

1. ISKANDAR IBRAHIM,S.IP.,M.SI
2. ILUMAR SUNE,S.SOs.,M.SI
3. Dr.GRETTY SYATRIANI SALEH,S.IP.,M.SI
4. EDY SIJAYA,S.IP.,M.SI
5. HASMAN UMURL,S.IP.,M.SI

1.
2.
3.
4.
5.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sospol

Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan



Dr. ARMAN S. S.Os., M.SI
NIDN:0913078602



DARMAWATY ABDUL RAZAK,S.IP.,M.AP
NID:0924076701

Tanggal lulus:.....2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 16. Maret.2020

; membuat Pernyataan




RAHMAWATI LADIKU

ABSTRAK

Rahmawati Ladiku : S.2116104, 2020, Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X₁), Keterampilan (X₂), dan Etika (X₃) *Secara Simultan* maupun secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa se kecamatan wonggarasi yang terdiri dari 7 desa yang berjumlah 76 orang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sample dalam penelitian ini adalah *Sampling Jenuh* yaitu semua anggota populasi di jadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa se-kecamatan wonggarasi yang berjumlah 76 orang.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Kapasitas Aparatur yang meliputi Pengetahuan (X₁), Keterampilan (X₂) dan Etika (X₃) secara *simultan* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 0.728 (72.8%). sedangkan sebesar 0.272 (27.2%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pengetahuan (X₁), secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.306 (30.6%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Keterampilan (X₂) secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.216 (21.6%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Etika (X₃) secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.212 (21.2%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan.

Kata Kunci : Kapasitas Aparatur, Pemerintah Desa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Harapan membutuhkan semangat agar terus berjuang, dan setiap perjuangan membutuhkan proses, namun proses itu tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak pernah bertindak”



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya

Kupersembahkan hasil usahaku dan rasa terima kasihku kepada yang teristimewa kedua orang tuaku yang selalu memberiku cinta dan kasih sayang tiada henti, mendidik dan membimbingku hingga dewasa, mengajarku pantang menyerah, selalu bersabar dan ikhlas, bersikap bijak dan tidak emosional menghadapi masalah dalam hidup.

**ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS
ICHSAN GORONTALO TEMPAT AKU
MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Studi di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato)**”. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan Skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Marten Nusi, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP, M.Si dan Umar Sune, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Teristimewa Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Konsep Kapasitas	10
2.1.1. Pengertian Kapasitas	10
2.1.2. Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	11
2.2. Konsep Aparatur, Birokrasi	18
2.2.1. Pengertian Aparatur	18
2.2.2. Pengertian Birokrasi	20
2.3. Konsep Efektifitas	22
2.3.1. Pengertian Efektifitas	22
2.3.2. Ukuran Efektivitas	24
2.3.3. Efektivitas Organisasi	26
2.4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	29
2.5. Penelitian Terdahulu	35
2.6. Kerangka Konseptual	37
2.7. Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41

3.1. Objek dan Waktu Penelitian	41
3.2. Desain Penelitian.....	41
3.3. Definisi Operasional Variabel	41
3.4. Populasi dan Sampel	43
3.5. Jenis dan Sumber Data	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	44
3.7. Prosedur Penelitian.....	44
3.8. Metode Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Wanggarasi.....	52
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Camat Wanggarasi	54
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanggarasi ..	55
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	56
4.1.5. Deskripsi Responden.....	64
4.2. Analisis Hasil Penelitian	66
4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	66
4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	67
4.2.3. Analisa Data Statistik dan Pengujian Hipotesis	83
4.2.4. Pengujian Hipotesis.....	85
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	86

BAB V P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sumber daya Manusia Kantor Camat Wanggarasi	52
Tabel 2 : SDM Kantor Camat Wanggarasi Menurut Pendidikan	53
Tabel 3 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Tabel 5 : Lama Kerja.....	65
Tabel 6 : Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 7 : Hasil Uji Reliabilitas.....	66
Tabel 8 : Skala Penilaian Jawaban Responden DD	67
Tabel 9 : Nilai (Skor) Pengetahuan (X_1)	68
Tabel 10 : Nilai (Skor) Keterampilan (X_2).....	70
Tabel 11 : Nilai (Skor) Etika (X_3)	72
Tabel 12 : Nilai (Skor) Efektifitas (Y)	75
Tabel 13 : Matriks Korelasi antara Variabel X dan Y	83
Tabel 14 : Koefisien Jalur P_{YX}	83
Tabel 15 : Dekomposisi Pengaruh Variabel X Terhadap Y.....	84
Tabel 16 : Uji Kemaknaan Signifikan Variabel X Terhadap Y	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya didalam daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, karena itu upaya memperkuat desa dalam artian pemerintahan dan lembaga masyarakat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa sangatlah penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional, karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Dengan keadaan yang seperti itu, maka keberadaan desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi

landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam yang stabil dan dinamis.

Memang ada banyak hal yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang sangat mendasar karena dengan ditetapkannya status sebagai daerah otonom yang luas, memungkinkan setiap daerah khususnya desa mengembangkan kreasi dan inovasi yang tinggi dalam mengurus rumah tangganya. Dalam format seperti ini, kebutuhan ketersediannya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah-langkah prioritas yang terprogram secara sistematis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi kebebasan berkreasi pembangunan daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik apabila aparatur pemerintah desa memiliki kompetensi yang memadai serta didukung oleh kelembagaan masyarakat yang bergerak secara bersama-sama dengan pemerintah desa dalam pembangunan”.

Faktor manusia merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didasari karena manusialah yang menjalankan mekanisme pemerintahan. Beberapa sumber daya manusia yang secara potensial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah aparatur

pemerintah daerah. Unsur ini menempati posisi yang bukan saja mewarnai, melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dimana aparaturnya merupakan pelaksanaan kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga diperlukan persyaratan kualitas yang memadai dari unsur sumber daya manusia ini.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparaturnya karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparaturnya yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan semakin baik, cepat dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparaturnya merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktural pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang

menyeluruh. Maka dengan demikian aparat desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pelayanan administrasi khususnya administrasi kependudukan, pembuatan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Kecamatan wonggarasi merupakan bagian dari daerah kabupaten pohuwato yang merupakan daerah otonom, kabupaten pohuwato sendiri memiliki 13 kecamatan. Menurut data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten pohuwato, kecamatan wonggarasi memiliki jumlah penduduk paling kecil dari kecamatan lain, dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 5823 penduduk pada tahun 2017. Dengan jumlah desa sebanyak 7 desa.

Keberadaan aparatur desa di wilayah kecamatan Wonggarasi sangatlah diperlukan guna menjalankan segala kepentingan masyarakat yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tentunya dibutuhkan aparatur yang berkapasitas artinya memiliki upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang ada dalam diri manusia. Kondisi obyektif di lapangan menunjukan bahwa desa-desa secara umum masih berada pada kondisi tertinggal

baik dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan sulitnya lapangan pekerjaan.

Upaya meningkatkan kapasitas aparatur daerah pedesaan di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar, baik dalam rangka upaya pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Pada hasil pengamatan atau observasi awal di beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan Wonggarasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung (melihat) kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, serta mendengar adanya keluhan dari beberapa masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, dan dengan melakukan wawancara dengan menanyakan tingkatan persentase penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari hasil observasi awal tersebut didapat beberapa permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan kapasitas aparatur dan hubungannya dengan terhadap pencapaian efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kecamatan Wonggarasi, ditemukan beberapa permasalahan yakni:

- 1) Beberapa perangkat desa tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi pekerjaannya, jadi mereka bekerja hanya ketika ada warga yang datang melakukan administrasi saja atau tidak menggali apa yang semestinya mereka lakukan sesuai tugas pokok dan fungsi menurut peraturan yang telah

ditentukan.

- 2) Beberapa aparaturnya desa di wilayah kecamatan Wonggarasi masih minim dalam penggunaan teknologi seperti komputer. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwa sebagian pegawai lebih memilih menulis secara manual, kemudian membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada sekretaris atau pegawai lainnya untuk diketik.
- 3) Pembangunan fisik desa belum maksimal, sebagian besar pembangunan fisik belum dapat diselesaikan dikarenakan pencairan dana dari pemerintah pusat sering terlambat.
- 4) Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan PADes seperti membuat kebijakan dalam menggali potensi desa belum dimanfaatkan dengan baik, dimana pemerintah desa 100% bergantung pada pemerintah kabupaten dalam pembiayaan.

Pada prinsipnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu proses yang semestinya dilaksanakan secara baik dan terorganisir di setiap desa agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat tercipta. Namun pada umumnya keadaan dan kondisi organisasi dan manajemen desa masih keadaan lemah dan perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa tersebut ditambah lagi dengan para tokoh atau pemuka masyarakat dan para stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dalam menerima aspirasi masyarakat, menganalisa dari permasalahan yang dihadapi dan kemudian menyusun perencanaan desa secara partisipatif, pelaksanaan dan sistem evaluasi dan tindak lanjutnya yang berkesinambungan masih perlu ditingkatkan.

Kemudian peneliti juga ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan wanggarasi, merupakan sebuah masalah yang sangat menarik untuk terus dikaji dan dianalisis karena seberapapun tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada level provinsi dan kabupaten, tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kesadaran diri dalam peneliti pada observasi awal ini maka peneliti ingin melanjutkan observasi selanjutnya untuk mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena dengan cara menyebar angket (kuisisioner) untuk mengetahui kebenarannya yang nantinya akan dibahas di bab selanjutnya.

Berdasarkan gambaran latar belakang maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Studi di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato).**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dicari kebenaran dan jawabannya dalam penelitian lebih lanjut adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Simultan* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato?
2. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten

Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Simultan* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, anantara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu dijadikan bahan refrensi dalam penelitian sosial lainnya, serta dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan teori yang didapat selama perkuliahan terutama pada beberapa mata kuliah yang berkaitan tentang penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi aparaturnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya di wilayah Kecamatan

Wonggarasi. Serta bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan untuk memasuki tingkatan selanjutnya baik di bidang pendidikan, pekerjaan dan sosial lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kapasitas

2.1.1. Pengertian Kapasitas

Konsep dalam ilmu pengetahuan adalah menghubungkan apa yang ingin dijelaskan dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Salah satu konsep di dalam ilmu pengetahuan adalah konsep logika yang menerangkan sifat hubungan objek pemikiran yang satu dengan objek pemikiran lainnya dan melahirkan pemahaman baru. (Makmur, 2009:126)

Istilah kapasitas memiliki beragam pengertian tergantung siapa yang mengartikannya dan dalam konteks apa istilah tersebut akan digunakan. Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10) mengatakan bahwa: “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nation Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010:12) menyatakan bahwa “Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010:9) mendefinisikan “Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

2.1.2. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) dalam perkembangannya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *Capacity Building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Menurut Yap dalam Gandara (2008:9) bahwa *Capacity Building* adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu definisi *Capacity Building* menurut Grindel dalam Keban (2008:201) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa:

“*Capacity Building* merupakan rangkaian strategi ditunjukan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya

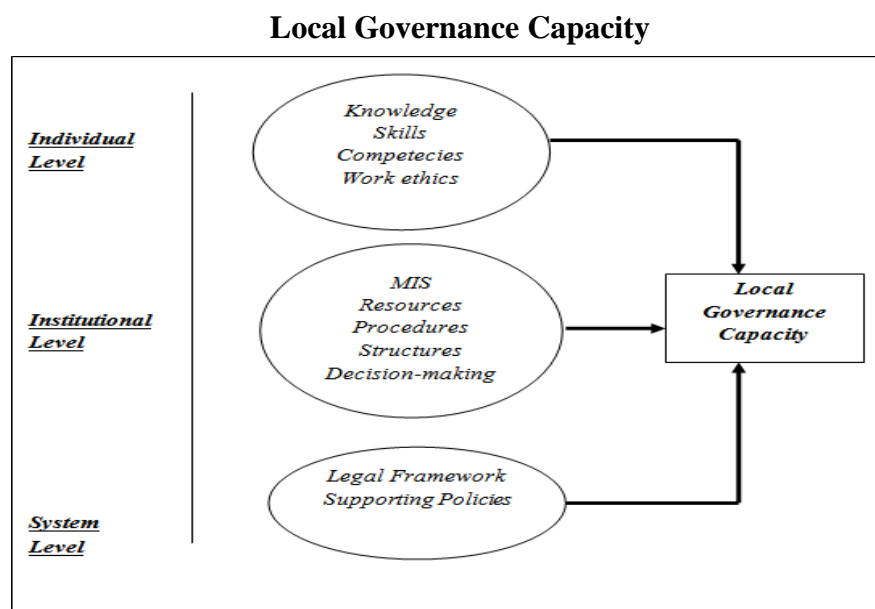
manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan”.

Berdasarkan definisi diatas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Canada International Development Agency (CIDA) dan berbagai lembaga donor lainnya cenderung memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai proses dimana para individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk: (1) Menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*Core Fungsion*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (2) Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan (UNDP,1998).

Menurut United Nation Development Program (UNDP 1998) dalam Rohdewohld (2004:3) peningkatan kapasitas dalam pemerintahan terdapat tiga level atau tingkatan seperti berikut:

Gambar 2.1



Sumber: Rohdewohld (2004:3)

Dari gambar diatas UNDP's dalam Rohdewohld (2004:3) mengatakan: *“The needs assesment syudy identified capacity building needs on the **system leve** (i.e. the legulatory framework and enabling national and regional policies), **the enity level** (i.e. an individual organisation's structures and working mechanisms, it's relationship with other relevant organisation, it's working culture and resources), and **the individual level** (i.e. skills and competencies of staff, work ethic)”*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kapasitas pemerintah terdapat tiga tingkat yakni pada tingkat sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan pengaturan, kebijakan- kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu. Tingkat intitusional atau keseluruhan satuan, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, penguatan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Kemudian tingkat individu, seperti pengembangan keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, kompetensi dari pegawai dan etika bekerja.

Dilakukannya ketiga tingkatan tersebut secara efektif dan berkesinambungan maka akan memberikan hasil yang berpengaruh kepada *good governance* sehingga dalam pengembangan kapasitas tersebut akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mampu dalam kapasitas teknis. Berdasarkan ketiga tingkatan tersebut maka dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan peneliti menjadikan salah satu tingkatan untuk dijadikan dimensi dalam penelitian ini, yakni pada tingkat individu yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Kemudian dari keempat komponen tingkat individu tersebut peneliti akan menggunakan konsep dari beberapa teori yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam penelitian.

Tingkat pengetahuan menurut Benyamin S. Bloom dalam Kencana (2011:20) ada enam tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain *kognitif* yaitu:

1. Mengetahui (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan paling rendah.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi atau penerapan (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokan dan sebagainya.

5. Sintetis (*synthesis*)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan- rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Sedangkan menurut *Robert L Katz* yang dikutip oleh Ulber Silalahi (2002:56), mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu:

a. Keterampilan teknik (*technical skills*)

Keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-prosedur atau pengetahuan tentang lapangan yang dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Keterampilan administratif

Keterampilan administratif merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

c. Keterampilan hubungan manusia

Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan seleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, member motivasi dan bimbingan dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

d. Keterampilan konseptual

Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan dan semua aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat

organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antara unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran keorganisasian.

e. Keterampilan diagnostik

Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan *circumstances* dari suatu kondisi-kondisi khusus. Singkatnya keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur, observasi dan fakta-fakta.

Menurut Wibowo (2007:87) kapasitas individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Terdapat enam tipe karakteristik, yaitu:

1. *Motiv* adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motiv mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. *Sifat* adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti halnya kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri kompetensi seorang pilot tempur.
3. *Konsep diri* adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir

setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.

4. *Pengetahuan* adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. *Keterampilan* adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.
6. *Etika* berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Etika juga merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

2.2. Konsep Aparatur, Birokrasi

2.2.1. Pengertian Aparatur

Secara harfiah Aparatur berasal dari kata “aparat” yang berarti alat, sedangkan kata aparatur sendiri mengandung pengertian alat-alat Negara sama dengan pegawai. Jadi aparatur adalah alat-alat yang menjalankan tugas negara. Menurut Makmur (2009:221) aparatur pemerintah adalah manusia yang memiliki karakteristik, kecakapan, dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1995:154) aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah/Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian aparatur pemerintahan disebut oleh Dharma Setyawan Salam dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa “Aparat pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan

tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”. (Setyawan, 2004:169).

Dari pendapat tersebut dapat diartikan aparatur merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya dapat melaksanakan tugas- tugas pemerintahan secara teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat aparatur desa atau aparatur pemerintah desa yang menjalankan tugas-tugas tersebut.

Peraturan Bupati Pohuwato No. 16 tahun 2015 pasal 1 ayat 9 bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. kemudian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Perbup Pohuwato No.16 tahun 2015 pasal 1 ayat 11).

Jadi pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Selanjutnya dalam perangkat desa adalah pegawai desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh kepala desa yang bertugas sebagai unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan pelaksana teknis.

Kemudian didalam pasal 3 ayat 1 kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat desa dan pelaksana teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf yang terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan
2. Urusan pembangunan

3. Urusan ketentraman dan ketertiban.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, aparatur adalah pegawai negara, pejabat negara, yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah sebagai abdi negara berarti melaksanakan kewajibannya dan mewujudkan tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia Keempat, sedangkan sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus dapat mendengarkan, menghimpun dan menelusuri setiap aspirasi dan keinginan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, aparatur pemerintah mempunyai tugas ganda yaitu mengabdikan kepada kepentingan Negara dan masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian kepada negara adalah dengan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik sehingga tujuan dalam penyelenggaraan tersebut terselenggara dengan baik.

2.2.2. Pengertian Birokrasi

Secara eptimologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani: *Bureau*, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Istilah ini sudah menjadi kosakata internasional. Menurut Peter dan Marshal dalam Kumorotomo (2005:74) mengatakan:

“Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”.

Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan-

keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien.

Birokrasi menurut Max Weber dalam Said (2010:2) mengatakan Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Sedangkan menurut Rod Hague dalam Said (2010:2) mengatakan bahwa birokrasi adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas negara. *“the bureaucracy is the institutions that carries out the function and responsibilities of the state. It is the engine-room of the state”*. Kemudian menurut Prethus (1960) dalam Said (2010:4) mengatakan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Di bawah ini merupakan kriteria birokrasi menurut Max Weber dalam Said (2010:5) kemudian merumuskan delapan prinsip tentang penyusunan sistem otoritas legal, yakni:

- a. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
- b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu.
- c. Jabatan tersusun secara hierarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (*complaint*).
- d. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun legal. dalam hal tersebut, manusia menjadi diperlukan.
- e. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi.

- f. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
- g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
- h. Sistem otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

Untuk mendukung pernyataan menurut Weber maka dijelaskan unsur-unsur birokrasi menurut Said (2010:96) unsur-unsur birokrasi itu menjadi 5 unsur utama dari birokrasi, yaitu:

1. Struktur organisasi birokrasi
2. Visi dan misi organisasi birokrasi
3. Personel atau pejabat birokrasi
4. Fasilitas pendukung birokrasi
5. Kepemimpinan birokrasi

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah jajaran keseluruhan pemerintahan negara yang bisa dikenal sebagai abdi masyarakat yang menjalankan sistem administrasi sebagai salah satu negara atau dengan kata lain birokrasi merupakan alat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.3. Konsep Efektifitas

2.3.1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efesiensi. Setiap organisasi mempunyai tujuan. Tujuan yang dicapai selalu berorientasi pada efektif dan efesien. Efektivitas umumnya disebut sebagai tingkat sampai dimana tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dicapai atau dapat dikatakan efektif itu diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan. Sedangkan efesiensi diarahkan pada pendayagunaan waktu, biaya, dan cara untuk mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (2005:92) menjelaskan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan yang terdapat antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, ketika suatu organisasi memiliki banyak output dari suatu yang dilakukannya dalam mencapai tujuan organisasi tersebut maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

Menurut James A.F. Stoner, et al, dalam Nawawi (2013:190) menjelaskan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai (*doing the right thing*) . Jadi jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Selanjutnya ditinjau dari ketepatan waktu, maka menurut Siagian (2002:171), efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu

yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung bila mana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan tentang bagaimana melaksanakannya serta biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek manfaat dan kemampuan melakukan tugas, maka menurut Arouf (Sedarmayanti, 2000:183) efektifitas adalah berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal dengan pencapaian kualitas, kuantitas dan waktu. Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi maupun sosial.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari berbagai pengertian efektivitas menurut para ahli diatas, secara ringkas bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian tujuan, ukuran tersebut dapat dilihat dari segi waktu, kualitas, manfaat dan kemampuan yang telah dicapai. Apabila ukuran tersebut sesuai dengan tujuan maka dapat dikatakan efektif.

2.3.2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program

berhasil.

Steers dalam Tangkilisan (2005:140-141) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja kemampuan berlaba
4. Pencarian sumber daya

Sementara Gibson et al. Dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, namun dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan, dalam pengertian sebagai misi terakhir, adalah pekerjaan yang sulit karena sering tujuan tidak dapat ditentukan dengan pasti.
2. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, adalah adanya kejelasan strategi untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu faktor lain yang menunjang efektivitas adalah tersedianya sarana prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas suatu organisasi pemerintahan, akan dilihat sejauh mana atau seberapa besar kemampuan organisasi pemerintahan dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan secara optimal fungsi-fungsi pemerintahan.

2.3.3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi mempunyai banyak pengertian, tergantung bagaimana cara kita memandangnya, sehingga mengandung pengertian yang multidimensi. Sesuatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang dimaksudkan bisa berasal dari pemerintahan ataupun organisasi

diluar pemerintahan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Stoner dalam Tangkilisan (2005:138), menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan Georgopualos dalam Tangkilisan (2005:139) mengatakan bahwa: “Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana organisasi yang merupakan suatu sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota- anggotanya”.

Konsep diatas menunjukan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapai tingkat efektivitas diungkapkan oleh Argris dalam Tangkilisan (2005:139) bahwa: “efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia”.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi- fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada. Suatu bentuk organisasi yang dapat dikatakan efektif itu apabila dapat tercapai tujuan dari organisasi itu dengan tepat waktu dan tepat guna.

Sudarmo dan Mulyono mengemukakan efektivitas organisasi adalah

sebagai berikut: “Efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya yang lebih luas. Efektivitas organisasi juga adalah suatu organisasi itu mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan merupakan ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi”. Sudarmo dan Mulyono (2001:128)

Robbins (2006:51) menyatakan efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: Dalam upaya menyelenggarakan aktivitas organisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Adanya suatu tujuan yang jelas
2. Sumber daya manusia
3. Struktur organisasi
4. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
5. Adanya sistem nilai yang dianut

Ada banyak rangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi seperti yang dikemukakan diatas, tetapi untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keriterianya sangatlah sulit karena harus melihat pada hasil-hasil penelitian terdahulu.

Menurut Steer dalam Tangkilisan (2005:151-155) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.

2. Karakteristik lingkungan

Karakter lingkungan ini mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi, yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar, dan peraturan pemerintah.

3. Karakteristik pekerja

Karakteristik pekerja berkaitan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja inilah yang menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

4. Kebijakan dan praktik manajemen

Manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang kita inginkan.

2.4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Menurut Sarundajang (2005:82) bahwa tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya-setidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:

1. Dari *segi politik* adalah untuk mengikutsertakan , menyalurkan inspirasi dan apresiasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Dari *segi manajemen pemerintahan*, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam

berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3. Dari *segi kemasyarakatan*, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
4. Dari *segi ekonomi pembangunan*, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dimana penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan apresiasi masyarakat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat, pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Menurut Ndraha (2003:66) menyatakan bahwa: “Berjalannya pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif karena di level pemerintahan inilah fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan pemerintahan daerah yang nyata dan faktual dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten dan kecamatan”.

Dari pendapat tersebut maka, jika dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa merupakan level yang paling lemah. Sedikit saja terjadi perubahan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, yang paling tidak siap dalam menghadapi perubahan itu adalah pemerintahan desa. Menurut Makmur (2008:7) mengatakan bahwa:

“Pada saat ini dapat dilihat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa telah bergeser menjadi hubungan berdasarkan kepentingan sehingga budaya kebersamaan, gotong royong, ikatan tradisional, dan iuran warga desa yang dahulu begitu kental sudah sukar dijalin. Kondisi ini menjadi semakin lemah dengan kondisi aparat desa yang kemampuannya sangat rendah, kewenangan pemerintah desa yang terbatas, dan kurangnya dukungan dana dan fasilitas dari pemerintahan tingkat atas”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Tangkilisan (2005:34) dikatakan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dibutuhkan tingkat desentralisasi yang tinggi. Desentralisasi dalam tingkat atau derajat yang tinggi menimbulkan konsekuensi kebutuhan untuk membangun daerah-daerah otonom yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi pula”.

Jadi penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila tingkat desentralisasi itu tinggi, karena dengan adanya desentralisasi dapat

menumbuhkan kemandirian daerah secara tidak langsung daerah tersebut dapat menciptakan kemandiriannya. Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Manajemen Pemerintahan), menurut Tangkilisan (2005:34-36) Penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

1. *Kepastian Hukum*, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Semua tindakan juga berimplikasi pada hukum. Oleh karena itu hukum harus dijadikan pegangan dan pedoman dalam menentukan cara berperilaku.
2. *Keadilan dan Kewajaran*, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan tugas yang dilakukan harus bersifat adil dan wajar secara proposional. Yang dimaksud dengan adil adalah suatu perlakuan yang seharusnya diberikan sesuai dengan hukum yang menaunginya dan pelayanan yang harus diberikan. Yang dimaksud dengan wajar adalah bahwatindakan yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak juga menyepelekan.
3. *Kesamaan*, pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah tidaklah diskriminatif berdasarkan perasaan suka atau tidak suka.
4. *Permainan yang Layak*, aturan yang diberlakukan kepada setiap warga negara mengikuti pertimbangan hukum yang wajar, tidak memberatkan.
5. *Cermat*, ketelitian dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

6. *Keseimbangan*, tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan dari berbagai segi secara sinergis. Tidak ada yang dirugikan.
7. *Pengharapan yang Wajar*, imbalan yang didapat dari suatu pekerjaan sudah mempunyai ukuran yang baku.
8. *Motivasi Keputusan*, setiap keputusan memiliki motivasi yang mendorongnya, baik yang bersifat preventif, *problem sloving*, atau proaktif.
9. *Kebijaksanaan*, situasi dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan perlunya kemampuan untuk mengadaptasikan suatu tindakan terhadap lingkungan setempat.
10. *Penyelenggaraan Kepentingan Umum*, pelayanan pemerintah terutama ditujukan kepada kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan kelompok, golongan atau pribadi.
11. *Perlindungan atas Pandangan Hidup*, setiap warga negara mempunyai hak atas pandangan hidupnya.
12. *Koordinasi dan Kesatuan Arah*, segenap tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah haruslah ditujukan kesatu arah, yaitu tujuan negara. Pembagian kerja hanyalah merupakan suatu usaha untuk pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dari pengertian tersebut sistem penyelenggaraan pemerintahan

sendiri adalah adanya otonomi daerah yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Porposionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektivitas dan efesiensi
- i) Kearifan lokal
- j) Partisipatif

Fenomena penyeleggaraan pemerintahan desa menarik untuk disorot karena merupakan level penyelenggaraan pemerintahan yang kurang tersentuh dari perhatian dan kepedulian pemerintah tingkat atas terhadap berbagai kelemahan pemerintahan desa dan hanya menjadi sentral dari berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu, dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan akan mampu memecahkan maslah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

memakai dua penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian dengan judul Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang merupakan jurnal dari Jaitun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman 2013. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui tentang kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam hal kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, tanggung jawab serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam peneliti ini adalah teori kinerja meliputi: kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, dan tanggung jawab. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik, karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan informasi kepada rekan kerjanya yang lain. Kedisiplinan aparatur desa hanya dapat dilihat dari keseragaman dinas saja, tidak dalam pelaksanaan tugasnya yang kurang disiplin dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan tersebut. Sedangkan kreatifitas dan tanggung jawab desa sudah berjalan dengan baik. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terlihat dari metode penelitian dan lokus penelitian.

Penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Keupok Kabupaten Aceh Utara. penelitian tersebut merupakan skripsi dari Sahlan Sahputra

Universitas Sumatera Utara 2008. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan program pembangunan desa, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan aparatur terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan metode penelitiannya adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan aparatur dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa pada program BBR-P2FM di desa keupok nibong kabupaten aceh utara. Hasil dari penelitian tersebut adalah kemampuan aparatur telah memenuhi kriteria dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dengan persentase 56%. Sedangkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada kategori tinggi dengan persentase 56%. Berdasarkan analisis korelasi terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan aparatur terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan, dan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi adanya hubungan sebesar 58%. Persamaan dari penelitian ini ada pada tema tentang kemampuan aparatur desa, metode penelitian dan hipotesis. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada teori yang digunakan, dan lokus penelitian.

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti maka dibuatlah kerangka berfikir yang mengacu pada identifikasi masalah yang dijabarkan pada bab 1 dan akan dikupas dengan teori yang dijabarkan pada

bab 2 dan akan dihasilkan kesimpulan yang akan memberikan manfaat. Dibawah ini adalah kerangka berfikir dari peneliti Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Wilayah Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato).

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

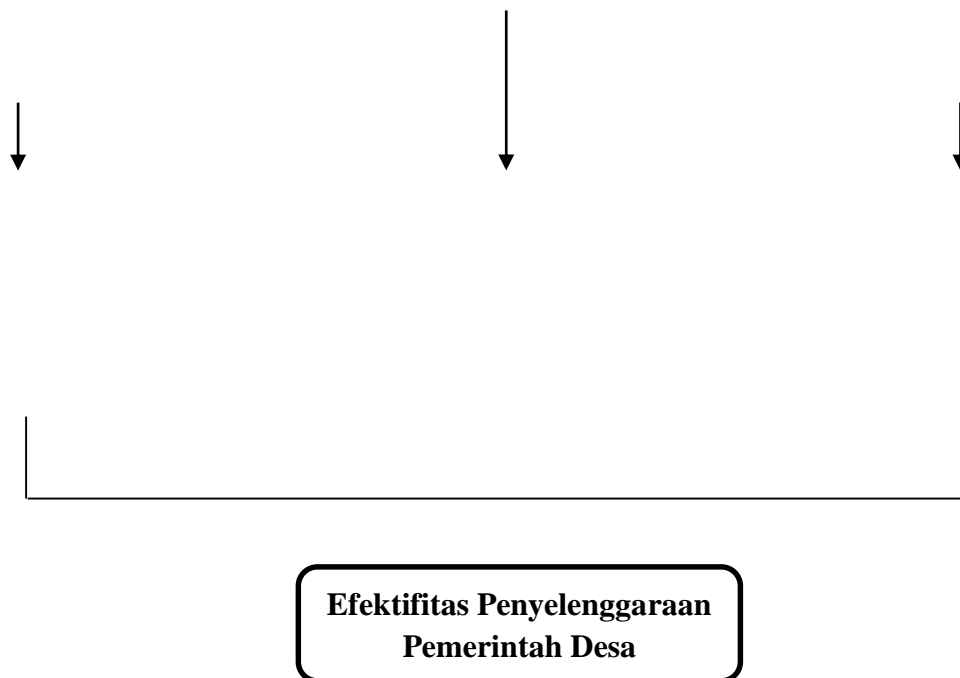
Kondisi obyektif di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa secara umum masih berada pada kondisi tertinggal baik dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan sulitnya lapangan pekerjaan. Upaya meningkatkan kemampuan aparatur daerah pedesaan di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar, baik dalam rangka upaya pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti halnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi ini bukan tanpa masalah. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu: (1) Rendahnya pengetahuan aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing. (2) Rendahnya keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi (komputer). (3)

Pembangunan fisik desa belum maksimal. (4) kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan PADes seperti menggali potensi desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Peneliti menggunakan konsep kapasitas aparatur sebagai variabel X. Pada Kapasitas, peneliti menggunakan konsep kapasitas Wibowo (2007:87) kapasitas individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Terdapat lima enam Indikator yaitu *motof, sifat, konsep diri, pengetahuan, keterampilan, dan Etika*. Akan tetapi untuk memudahkan peneliti dalam menilai kapasitas aparatur maka peneliti hanya mengambil 3 (tiga) indikator tersebut yang di anggap paling mendasar yakni *pengetahuan, keterampilan dan etika*. Dari ketiga masing-masing dimensi tersebut terdapat beberapa indikator yang akan digunakan sebagai *frame work* atau kerangka pemikiran, sehingga teori tersebut diharapkan dapat mengetahui seberapa besar tingkat kapasitas aparatur terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi. Sedangkan konsep efektivitas sebagai variabel Y. Pada efektivitas, peneliti menggunakan konsep efektivitas menurut Gibson el at., Steer, dan Tangkilisan. Dari ketiga konsep tersebut peneliti akan digunakan sebagai parameter penelitian. Dari teori efektivitas tersebut diharapkan dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi. Kemudian hasil dari kedua konsep tersebut dapat mengetahui adanya pengaruh antara kapasitas aparatur terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.

Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Konsep



Sumber : Wibowo (2007:87)

2.7. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2012:64) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesa terhadap penelitian ini sebagai berikut:

3. Terdapat pengaruh antara Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Simultan* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato?
4. Terdapat pengaruh antara Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2), dan Etika (X_3) *Secara Parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato?

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Kapasitas Aparatur serta Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penelitian ini dilakukan selama ± 2 (dua) bulan bertempat di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan

angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan metode survey langsung. Metode survey ini melalui cara dating langsung kelapangan dengan disertai menyebarkan kuesioner yang telah disusun. Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Ada 3 (tiga) variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu motivasi, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja karyawan.

3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan oprasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi oprasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur (Nazir, 2005:126).

Tabel 3.1
Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kapabilitas Aparatur (X)	1. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui • Aplikasi 	Ordinal
	2. Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan teknik • Keterampilan diagnostik 	Ordinal
	3. Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab • Larangan penyalagunaan wewenang 	Ordinal

Sumber : Wibowo (2007:87)

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y)	1. Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa 	Ordinal

		• Kepatuhan	
	2. Kebijakan dan Praktik Manajemen	• Ketepatan penyelenggaraan pemerintah desa • Pemanfaatan sumberdaya	Ordinal
	3. Penyelenggaraan kepentingan umum	• Proses penyelenggaraan pemerintah desa • Kepentingan masyarakat	Ordinal
	4. Tersedianya sarana dan prasaran	• Biaya dan kelembagaan • Sarana pemberdayaan	Ordinal
	5. Koordinasi dan kesatuan arah	• Pembagian kerja • Keserasian	Ordinal
	6. System pengawasan dan pengendalian	• Adanya system pengawasan • Pengendalian yang sifatnya mendidik	Ordinal

Sumber : Gibson et al. Dalam Tangkilisan (2005:141)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skalali kert. Kuisisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni : Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam table berikut ini :

Tabel 3.2 :Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
SangatSetuju /Selalu	5
Setuju /Sering	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang	3
TidakSetuju /Jarang	2
SangatTidakSetuju /TidakPernah	1

Sumber : Sugiyono,1997:56

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut (Sugiyono,1997:57), definisi populasi yaitu “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa se kecamatan wonggarasi yang terdiri dari 7 desa yang berjumlah 76 orang.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2008:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling* Jenuh yaitu semua anggota populasi di jadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa se-kecamatan wonggarasi yang berjumlah 76 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.7.1 UjiValiditas

Menurut Arikunto (2001:219) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (1999:106) menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2) ((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}$$

dimana :

r	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t	=	Nilai t hitung
n	=	Jumlah responden
r	=	Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan di bandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3.3, berikut :

Tabel 3.3
Interpretasi koefisien korelasi

R	Keterangan
0,000 < 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 < 0,399	Korelasi rendah
0,400 < 0,699	Korelasi sedang

$0,700 < 0,899$	Korelasi Tinggi
$0,900 < 1,000$	Korelasi sangat tinggi

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Uji dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown*, yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.
4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_{b1} = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r_i hitung $> r$ tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).

6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{(density \text{ at lower limit}) - density \text{ at upper limit}}{(area \text{ under upper limit}) - (density \text{ under lower limit})}$$

Keterangan :

<i>density at lower limit</i>	: Kepadatan batas bawah
<i>density at upper limit</i>	: Kepadatan batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas bawah

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

7. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
8. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
9. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden

10. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
11. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
12. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{(\text{density at lower limit}) - \text{density at upper limit}}{(\text{area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

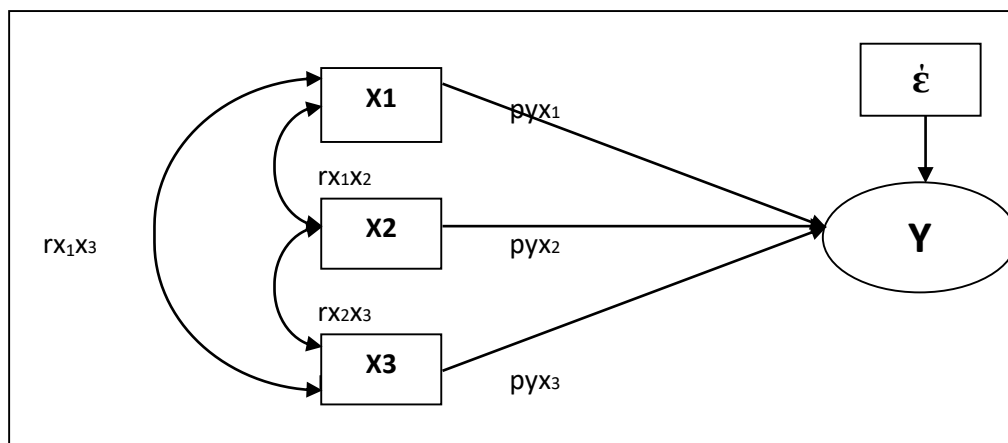
Keterangan :

<i>density at lower limit</i>	: Kepadatan batas bawah
<i>density at upper limit</i>	: Kepadatan batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode Analisis

3.8.1. Rancangan Uji Hipotesis

Rancangan uji hipotesis dilakukan untuk memastikan variabel X yaitu Kapasitas Aparatur, berpengaruh terhadap Efektifitas (variabel Y), dengan menggunakan jalur, sebagai berikut :



Keterangan

- X1 : Pengetahuan
 X2 : Keterampilan
 X3 : Etika
 Y : Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 ϵ : Variabel lainnya yang mempengaruhi Y

Data yang terkumpul di analisis hubungan kausalnya antara variabel-variabel atau dimensi-dimensi yang dilakukan dengan menggunakan jalur (path analysis) yang memperlihatkan pengaruh antar variabel. Gambar diatas juga memperlihatkan bahwa variabel Y tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh X tetapi ada variable lain ikut mempengaruhi yang dinyatakan dengan variable epselon (ϵ) yaitu variabel yang tidak diukur dan diteliti.

3.8.2. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam pengujian hipotesis menggunakan path analysis (Nirwana dalam Darnawati, 2003:64-65) dengan langkah-langka sebagai berikut :

1. Membuat persamaan struktural, yaitu:

$$Y = \beta_{YX_1}X_1 + \beta_{YX_2}X_2 + \beta_{YX_3}X_3 + \epsilon$$

2. Menghitung matrix korelasiantar X1,X2,X3 dan Y
3. Menghitung matriks korelasi antar variable eksogenus, yaitu
4. Menghitung matriks invers R^{-1}
5. Menghitung Koefisien jalur β_{YX_i} ($i = 1,2,3$)

6. Menghitung R^2_y (X_1 , X_2 , X_3) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total X_1 , X_2 , X_3 terhadap Y
7. Hitung pengaruh variabel lain ($P_{y\epsilon}$)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Wanggarasi

Kecamatan Wanggarasi adalah salah satu kecamatan wilayah Barat Kabupaten Pohuwato, secara administratif kecamatan wanggarasi mewilayahi

tujuh Desa, Desa Yipilo, Desa Wonggarasi Timur, Desa Limbula, Desa Bukit Harapan, Desa Tuweya, Desa Bohusami, dan Desa Lembah Permai, Kecamatan Wanggarasi dimekarkan pada tahun 2008, Dasar pembentukan Kecamatan Wanggarasi tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato no 02 tahun 2008.

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Adapun sumber daya aparatur pemerintah kecamatan wanggarasi sebagai berikut:

Tabel-1
Sumber daya Manusia Kantor Camat Wanggarasi

NO	GOLONGAN	TAHUN (Orang)					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Golongan IV	2	2	2	2	1	
2	Golongan III	7	9	10	12	13	
3	Golongan II	15	16	14	10	7	
4	Golongan I	-	-	-	-	-	
5	Non PNS	4	4	4	4	1	
J u m l a h		27	28	31	30	24	

Tabel-2
Sumber Daya Manusia Kantor Camat Wanggarasi Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	TAHUN (Orang)					JK (2016)		KET
		2012	2013	2014	2015	2016	Lk	PR	
1	Sarjana	6	9	11	15	14	9	5	

2	D III	2	2	1	-	-			
3	D II	-	-	-	-	-			
4	D I	1	1	1	1	1	1		
5	SMA / Sederajat	17	16	15	11	7	7	-	
Jumlah		27	28	31	30	22	17	5	

Berdasarkan data SDM aparat pada tabel di atas dapat dilihat jelas bahwa SDM Kantor camat wanggarasi cukup representatif secara Golongongan dan Pendidikan, walaupun masih ada beberapa orang yang belum melanjutkan jenjang ke Sarjana, selain itu dapat dilihat pula jumlah SDM aparatur Masih Minim hal ini tentunya tidak berimbang dengan tugas dan tanggungjawab kewenangan kecamatan dalam hal pelayanan,

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan Wanggarasi mempunyai beberapa kinerja pelayanan antara lain :

1. Melaksanakan kebijakan – kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.
2. Melaksanakan perundang – undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
3. Menjalani koordinasi dengan muspika, dinas / instansi terkait dan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di wilayah
4. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif
5. Melaksanakan pengembangan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat.
6. Melaksanakan pembinaan pada pegawai di lingkungan kecamatan serta melaksanakan pembinaan pada masyarakat.

4.1.2. Visi dan Misi Kantor Camat Wanggarasi

Adapun visi dan misi kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Visi Kecamatan Wanggarasi Adalah "Mewujudkan Wanggarasi Yang Hijau, Aman dan Tentram dan Sejahtera Yang Dilandasi Oleh Iman dan Taqwa (IMTAQ)".

HIJAU : adalah suatu cita – cita dalam rangka mewujudkan kawasan yang Asri dan nyaman serta berwawasan lingkungan.

AMAN : adalah suatu cita-cita mewujudkan Lingkungan yang tertib dan nyaman.

TENTRAM : adalah suatu cita – cita memelihara Persatuan, Kesatuan dan Persaudaraan di Lingkungan masyarakat.

SEJAHTERA : adalah suatu cita – cita meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyataan dan menekan angka Kemiskinan.

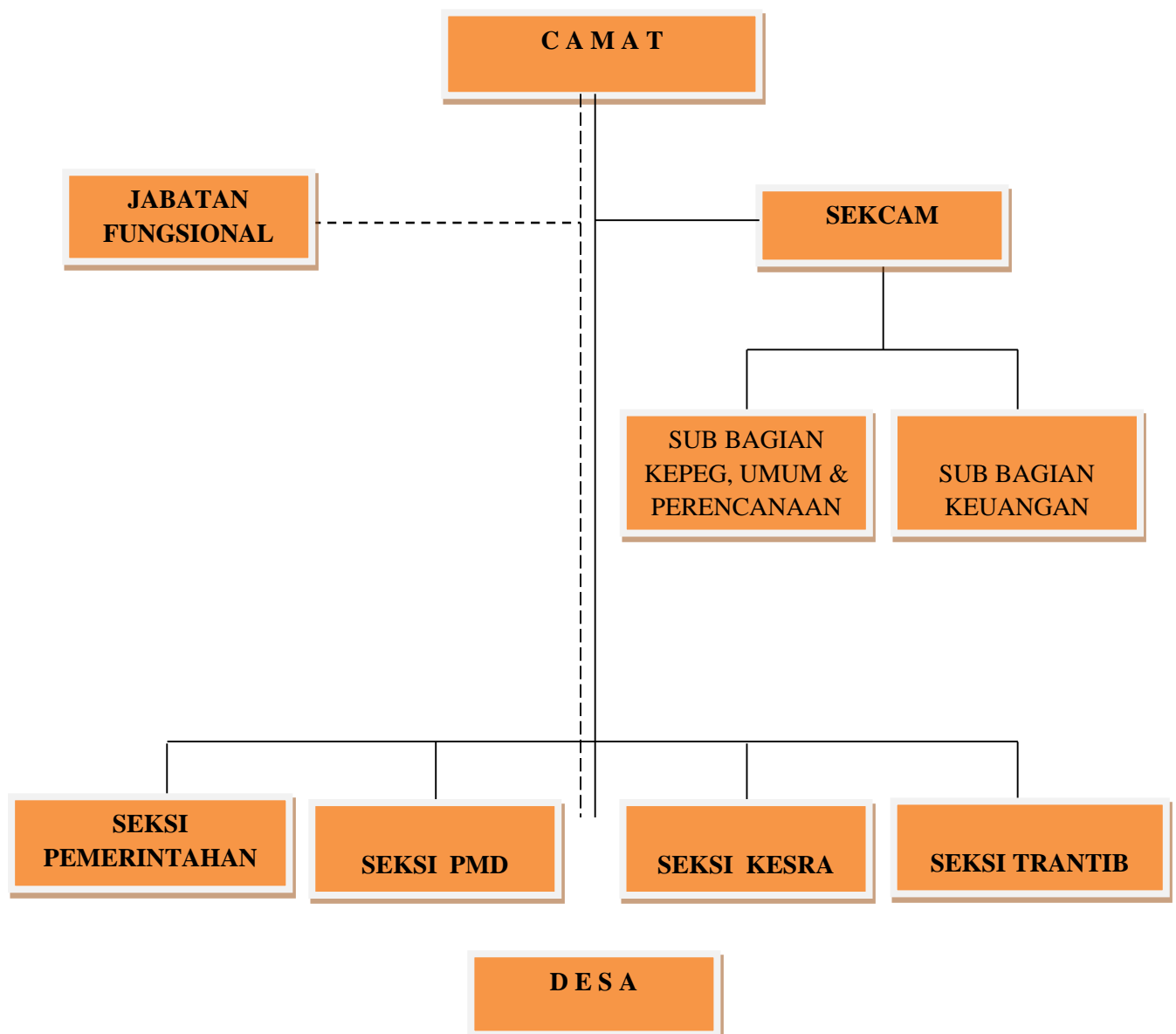
2. Misi Kecamatan Wanggarasi adalah :

- Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
- Mewujudkan Wilayah Yang Hijau Dan Nyaman
- Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan
- Mewujudkan Wilayah Yang Baik, Masyarakat Sejahtera, Tentram Dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Religius.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanggarasi

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari telah dibentuk struktur organisasi pada Kantor Camat Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi



4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Wanggarasi

Dari Struktur Organisasi Kantor Camat Wanggarasi diatas, maka berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah panduan bagi setiap satuan kerja Pemerintah Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Wanggarasi

Kantor Camat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilimpahkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- ✚ Merencanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ✚ Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

- ✚ Membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur di wilayah Kantor Camat.
- ✚ Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum secara Ekstern / intern untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
- ✚ Melakukan tindakan preventif terhadap permasalahan yang timbul di wilayah Kantor Camat secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan masyarakat.
- ✚ Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
- ✚ Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan/.tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- ✚ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat.
- ✚ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- ✚ Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

B. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kantor Camat

Mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah Kantor Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pemerintahan di Kantor Camat.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Kantor Camat mempunyai fungsi :

- ✚ Menghimpun kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintah Kantor Camat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengumpulkan data kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan untuk tertibnya penataan administrasi.
- ✚ Menyusun program unit berdasarkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- ✚ Melaksanakan tugas di bidang kepegawaian berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya manajemen kepegawaian.
- ✚ Melaksanakan tugas di bidang perlengkapan dan umum sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit.
- ✚ Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan RASK/DASK untuk tertibnya administrasi keuangan.
- ✚ Mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- ✚ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

C. Tugas Dan Fungsi Bagian Perencanaan Kepegawaian Dan Umum

✚ Tugas

1. Membuat rencana penyusunan anggaran

2. Membuar rencana pembangunan Kantor Camat
3. Membuat rencana per triwula, semester dan tahunan
4. Rencana kerja tahunan (RKT)
5. Rencana kerja kegiatan (RKK)
6. Pengukuran pencapaian sasaran (PPS)
7. Membuat lakip
8. Menyelenggarakan administrasi pegawai



Fungsi

1. Mengelola system administrasi kepegawaian yang satuan administrasi pengkatnya ada di Kantor Camat
2. Melaksanakan fungsi sebagai perencana dan pengelola program dan kegiatan di Kantor Camat
3. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan kedinasan

D. Tugas Dan Fungsi Bagian Keuangan



Tugas

1. Menyiapkan dokumen anggaran satuan kerja Kantor Camat
2. Melaksanakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran ke kas daerah
3. Melaporkan surat pertanggung jawaban dokumen satuan anggaran
4. Mengendalikan pelaksanaan anggaran dan kegiatan
5. Membuat rencana anggaran kas
6. Melaksanakan verifikasi dan analisis kebutuhan atas laporan pertanggung jawaban bendahara



Fungsi

Melaksanakan fungsi sebagai pengelola system keuangan Kantor Camat, melakukan verifikasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan Kantor Camat dan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Kantor Camat.

E. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas di bidang administrasi pemerintahan umum di tingkat kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya penyelenggaraan pemerintahan.

- ✚ Menghimpun kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan Kantor Camat sesuai kebutuhan sebagai peoman pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengumpulkan data di bidang pemerintahan secara terpadu untuk mengetahui gambaran/keadaan potensi wilayah Kantor Camat.
- ✚ Mengelola data potensi wilayah Kantor Camat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.
- ✚ Menyusun rencana kegiatan pemerintahan Kantor Camat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit.
- ✚ Melakukan penataan administrasi pemerintahan sesuai jenisnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- ✚ Mengelola perijinan sesuai jenis peruntukannya untuk beroleh kepastian hukum.
- ✚ Melakukan bimbingan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan secara langsung/tidak langsung untuk mengetahui perkembangannya.

- ✚ Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- ✚ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

F. Tugas Dan Fungsi Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ✚ Melakukan pemberdayaan masyarakat
- ✚ Meningkatkan taraf hidup baik lahiriyah maupun batiniah
- ✚ Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan serta aparatnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- ✚ Mendata penduduk/KK miskin sekali
- ✚ Mendata penerima mahayani
- ✚ Mendata monografi, demografi, profil Kantor Camat, desa dan kelurahan
- ✚ Mendata pengusaha, badan usaha, pengrajin, pedagang asongan, took, kios dan kube
- ✚ Mendata proyek yang sudah dilaksanakan
- ✚ Mendata harga bahan pokok dari hasil panen/bahan lain
- ✚ Mendata profil desa/Kantor Camat
- ✚ Membuat laporan rencana dan program pencapaian pembangunan
- ✚ Melakukan musrenbang desa dan Kantor Camat

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Mempunyai tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya keamanan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- ✚ Menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengumpulkan data rawan konflik secara langsung/tidak langsung untuk beroleh gambaran/keadaan wilayah Kantor Camat.
- ✚ Mengelola data rawan konflik sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.
- ✚ Menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
- ✚ Melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan skala prioritas untuk terciptanya keamanan wilayah.
- ✚ Melakukan penegakan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan di wilayah Kantor Camat sesuai jenisnya untuk supremasi.
- ✚ Memproses masalah pertahanan sesuai jenis untuk perlindungan hukum.
- ✚ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat.
- ✚ Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- ✚ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

H. Tugas dan Fungsi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas di bidang sosial kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, seksi sosial dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi :

- ✚ Menghimpun kebijakan teknis di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- ✚ Mengumpulkan data sosial dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran keadaan masyarakat.
- ✚ Mengelola data sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.
- ✚ Menyusun rencana kegiatan sosial dan kesejahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit.
- ✚ Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
- ✚ Melakukan pembinaan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat secara terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.1.5. Deskripsi Responden

Kuisisioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 76 kuisisioner dengan penelitian yaitu Seluruh Aparatur Desa . Kuisisioner yang kembali juga berjumlah 76 kuisisioner Jadi *responserate* dalam penelitian ini ialah 100 % artinya semua jawaban lengkap dan layak digunakan untuk analisa. Berikut akan dipaparkan karakteristik responden.

Adapun karakteristik responden Secara umum berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama kerja sebagai Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Wanggarasi kabupaten pohnohuato dapat diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase%
1	Pria	36	47.4
2	Wanita	40	52.6
Total		76	100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 76 yang menjadi responden pada penelitian ini, 40 orang berjenis kelamin pria dengan persentase 52.6%. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 40 dengan persentase 47.4%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah responden berjenis kelamin pria lebih banyak dari jumlah responden berjenis kelamin wanita.

Tabel 4 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase%
1	SLTP	-	-
2	SMA/Sederajat	42	55.3
3	Diploma	8	10.5
4	Strata 1 (S1)	26	34.2
Total		76	100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 42 orang yang berpendidikan SMA/Sederajat dengan persentase 55.3%, kemudian terdapat 26 orang yang berpendidikan S1 atau Sarjana dengan persentase 34.2%, 8 orang dengan persentase 10.5%. Sedangkan aparat desa yang berpendidikan SLTP sudah tidak lagi. Hal ini menunjukan bahwa aparat desa diwilayah kecamatan wanggarasi paling banyak yang pendidikan SMA/Sederajat.

Tabel 5 : Lama Kerja

No	Pangkat Golongan	Frekuensi	Prosentase%
1	1-2 Tahun	24	31.6
2	2-4 Tahun	39	51.3
3	4-6 Tahun	10	13.2
4	Lebih dari tahun	3	3.9
Total		67	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 39 orang yang memiliki masa kerja 2-4 tahun dengan persentase 51.3%, kemudian yang memiliki masa kerja 1-2 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 31.6%, sebanyak 10 orang dengan masa kerja 4-6 tahun, sedangkan yang memiliki masa kerja lebih dari 6 tahun hanya sebanyak 3 orang dengan persentase 3.9. Hal ini menunjukan bahwa aparatur desa yang memiliki masa kerja paling lama adalah 2-4 tahun sudah menjadi aparatur desa.

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program komputer pada halaman lampiran menunjukkan bahwa keseluruhan item dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel.

4.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji ini dilakukan dengan mengukur korelasi antara masing-masing item pertanyaan

dengan total, semua item pertanyaan dikatakan valid jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Dalam uji ini korelasi yang digunakan adalah korelasi *Rank Spearman*.

Uji validitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	T.Validitas	Ket
Pengetahuan (X1)	4	Valid	Lampiran
Keterampilan (X2)	5	Valid	Lampiran
Etika (X3)	5	Valid	Lampiran
Efektifitas (Y)	18	Valid	Lampiran

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan itu layak (dapat dipercaya), walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Uji Reliabilitas masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r_1	r tabel	Reliabilitas (jika $r_1 > r$ tabel)
Pengetahuan (X1)	0.700	0.227	Reliabel
Keterampilan (X2)	0.543	0.227	Reliabel
Etika (X3)	0.627	0.227	Reliabel
Efektifitas (Y)	0.603	0.227	Reliabel

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 7 diatas, diperoleh angka reliabilitas (r_1) untuk setiap variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0.227. Hal ini berarti setiap variabel dalam penelitian tersebut sudah layak (reliabel).

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini searah dengan pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 76 = 76$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 76 = 380$$

$$\text{Rentang skala : } \frac{380 - 76}{5} = 60.8 (61)$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 8 berikut ini :

Tabel-8 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
319 - 380	Sangat tinggi
257 - 318	Tinggi
195 - 256	Sedang
133 - 194	Rendah
71 - 132	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan 2019

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator adalah :

4.2.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan (X₁)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Pengetahuan (X₁) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9 : Nilai (Skor) Pengetahuan (X₁)

Bobot Tangg. Resp	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	15	75	19.7	11	55	14.5	17	85	22.4	20	100	26.3
4	61	244	80.3	55	220	72.4	51	204	67.1	56	224	73.7
3	0	0	0	10	30	13.1	8	24	10.5	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	319	100	76	305	100	76	313	100	76	324	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Saya Mampu Mengingat Semua Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang dengan skor 75 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 61 orang dengan skor 244 menjawab Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi mampu mengingat semua tugas pokok dan fungsi masing-masing pekerjaan, dengan skor total adalah 319 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya Mampu Melaksanakan Pekerjaan dengan Baik. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 55 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 55 orang dengan skor 220

memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 10 orang dengan skor 30 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi memiliki pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor total adalah 305 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai dengan pengetahuan yang saya miliki, saya dapat menguasai bidang tugas departement lain. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 17 orang dengan skor 85 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 51 orang dengan skor 204 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 8 orang dengan skor 24 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi bukan hanya menguasai pada bidangnya tetapi juga menguasai bidang yang lain, dengan skor total adalah 313 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 4 dari tanggapan responden mengenai dengan pengetahuan yang saya miliki, saya lebih menguasai bidang tugas yang saya kerjakan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 20 orang dengan skor 100 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 56 orang dengan skor 224 memberikan jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan sangat menguasai bidang tugas yang diberikan, dengan skor total adalah 324 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

4.2.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Keterampilan (X₂)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Keterampilan (X₂) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 10 : Nilai (Skor) Keterampilan (X₂)

Bobot Tangg. Resp	Item 1			Item 2			Item 3		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	7	35	9.2	9	45	11.8	5	25	6.6
4	39	156	51.3	38	152	50.0	48	192	63.2
3	21	63	27.6	25	75	32.9	23	69	30.3
2	9	18	11.8	4	8	5.3	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	272	100	76	280	100	76	286	100

Bobot Tangg. Resp	Item 4			Item 5		
	f	Skor	%	f	Skor	%
5	22	110	28.9	18	90	23.7
4	54	216	71.1	41	164	53.9
3	0	0	0	17	51	22.4
2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	326	100	76	305	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Saya Memiliki Keterampilan dalam Menggunakan atau Mengoprasikan IT (Komputer/Laptop). Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 39 orang dengan skor 256 memberikan jawaban setuju, sebanyak 21 orang dengan skor 63 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 9 orang dengan skor 28 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi hanya sebagian yang memiliki keterampilan dalam menggunakan Komputer/Laptop, sedangkan yang lainnya tidak menguasai, dengan skor total adalah 272 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 2 dari tanggapan responden Dengan Keterampilan Saya dalam Penggunaan Komputer, Dapat Memperlancar Pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45

memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 38 orang dengan skor 152 memberikan jawaban setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 4 orang dengan skor 8 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi hanya sebagian bisa menggunakan Komputer/Laptop yang dapat memperlancar pekerjaan, sedangkan yang lainnya tidak menguasai, dengan skor total adalah 280 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 3 dari tanggapan responden saya handal dalam melaksanakan prosedur kerja. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 48 orang dengan skor 192 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 23 orang dengan skor 69 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi hanya termasuk handal dalam melaksanakan prosedur kerja di kantor desanya masing-masing, dengan skor total adalah 286 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 4 dari tanggapan responden Saya Senantiasa Berdiskusi dalam Melakukan Pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 22 orang dengan skor 110 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 54 orang dengan skor 216 menjawab Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato selalu berdiskusi dalam melakukan pekerjaan, baik dengan kepala desa maupun dengan sesama aparatur, untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan skor total adalah 326 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 5 dari tanggapan responden keterampilan yang saya miliki sesuai dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 18 orang dengan skor 90 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 41 orang dengan skor 164 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 17 orang dengan skor 51 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato sebagian besar memiliki keterampilan sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan, dengan skor total adalah 305 termasuk kategori **Tinggi**.

4.2.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Etika (X₃)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Etika (X₃) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 11 : Nilai (Skor) Etika (X₃)

Bobot Tangg. Resp	Item 1			Item 2			Item 3		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	23	115	30.3	25	125	32.9	19	95	25.0
4	43	172	56.6	42	168	55.3	44	176	57.9
3	10	30	13.2	9	27	11.8	13	39	17.1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	317	100	76	320	100	76	310	100

Bobot Tangg. Resp	Item 4			Item 5		
	f	Skor	%	f	Skor	%
5	10	50	13.2	6	30	7.9
4	32	128	42.1	26	104	34.2
3	25	75	32.9	25	75	32.9
2	9	18	11.8	19	38	25.0
1	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	271	100	76	247	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai tingkat pencapaian volum kerja yang saya hasilkan telah sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 23 orang dengan skor 115 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 43 orang dengan skor 172 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 10 orang dengan skor 30 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menghasilkan volume kerja sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, dengan skor total adalah 317 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 2 dari tanggapan responden Saya sanggup menerima konsekuensi apapun dalam melaksanakan pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 25 orang dengan skor 125 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 42 orang dengan skor 168 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 9 orang dengan skor 27 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar sanggup menerima konsekuensi apapun dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor total adalah 320 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai saya mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prioritas kerja. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 19 orang dengan skor 95 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 44 orang dengan skor 176 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 13 orang dengan skor 39 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian

besar mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prioritas kerja, dengan skor total adalah 310 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 4 dari tanggapan responden terdapat sanksi untuk aparaturnya yang menyalahgunakan wewenang. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 50 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 32 orang dengan skor 128 memberikan jawaban setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 9 orang dengan skor 18 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa aparaturnya di kecamatan wanggarasi apabila menyalahgunakan wewenang maka akan diberikan sanksi meskipun ada juga di desa lainnya tidak diberikan sanksi, dengan skor total adalah 271 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 5 dari tanggapan responden saya diberi kewenangan dan keleluasaan didalam pengambilan keputusan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 26 orang dengan skor 104 memberikan jawaban setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 19 orang dengan skor 38 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa aparaturnya di kecamatan wanggarasi sebagian besar tidak diberi kewenangan dan keleluasaan didalam pengambilan keputusan, dengan skor total adalah 247 termasuk kategori **Sedang**.

4.2.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Efektifitas (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan

Wanggarasi Kabupaten Pohuwato (Y) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 12 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 12 : Nilai (Skor) Efektifitas (Y)

Bobot Tangg. Resp	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	25	125	32.9	15	75	19.7	22	110	28.9	25	125	32.9
4	51	204	67.1	41	164	53.9	35	140	46.1	51	204	67.1
3	0	0	0	20	60	26.3	19	57	25.0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	329	100	76	299	100	76	307	100	76	329	100

Bobot Tangg. Resp	Item 5			Item 6			Item 7			Item 8		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	4	20	5.3	7	35	9.2	13	65	17.1	6	30	7.9
4	44	176	57.9	45	180	59.2	48	192	63.2	38	152	50.0
3	28	84	36.8	24	72	31.6	15	45	19.7	28	84	36.8
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5.3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	280	100	76	287	100	76	302	100	76	266	100

Bobot Tangg. Resp	Item 9			Item 10			Item 11			Item 12		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	10	50	13.2	21	105	27.4	9	45	11.8	0	0	0
4	55	220	72.4	55	220	72.4	45	180	59.2	37	148	48.7
3	11	33	14.5	0	0	0	22	66	28.9	33	99	43.4
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	7.9
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	303	100	76	325	100	76	291	100	76	259	100

Bobot Tangg. Resp	Item 13			Item 14			Item 15		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	11	55	14.5	19	95	25.0	16	80	21.1
4	54	216	71.1	51	204	67.1	60	240	78.9
3	11	33	14.5	6	18	7.9	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	304	100	76	317	100	76	320	100

Bobot Tangg. Resp	Item 16			Item 17			Item 18		
	f	Skor	%	f	Skor	%	f	Skor	%
5	6	30	7.9	7	35	9.2	7	35	9.2
4	22	88	28.9	34	136	44.7	36	144	47.4
3	25	75	32.9	28	84	36.8	31	93	40.8
2	23	46	30.3	7	14	9.2	2	4	2.6
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	76	239	100	76	269	100	76	276	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai dengan adanya pedoman kerja, saya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 25 orang dengan skor 125 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 51 orang dengan skor 204 memberikan jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar dapat melaksanakan tugas dengan baik apabila ada pedoman kerja, dengan skor total adalah 329 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 2 dari tanggapan responden mengenai saya selalu datang ke kantor dengan tepat waktu. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang dengan skor 75 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 41 orang dengan skor 164 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 20 orang dengan skor 60 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar selalu datang ke kantor dengan tepat waktu, dengan skor total adalah 299 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai peraturan yang diberikan membatasi saya dalam berperilaku. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 22 orang dengan skor 110 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 35 orang dengan skor 140 memberikan jawaban setuju, dan

sebanyak 19 orang dengan skor 57 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparaturnya di kecamatan wanggarasi sebagian besar menganggap bahwa peraturan yang diberikan membatasi aparat dalam berperilaku, dengan skor total adalah 307 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 4 dari tanggapan responden mengenai setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa telah terorganisir sesuai tujuan yang telah dibuat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 25 orang dengan skor 125 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 51 orang dengan skor 204 memberikan jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparaturnya di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa telah terorganisir sesuai tujuan yang telah dibuat, dengan skor total adalah 329 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 5 dari tanggapan responden mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 orang dengan skor 20 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 44 orang dengan skor 176 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparaturnya di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, dengan skor total adalah 280 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 6 dari tanggapan responden mengenai potensi desa dimanfaatkan dengan baik. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan

sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 45 orang dengan skor 180 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 24 orang dengan skor 72 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa potensi desa dimanfaatkan dengan baik, dengan skor total adalah 287 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 7 dari tanggapan responden mengenai saya melayani masyarakat sesuai prosedur yang ada. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 13 orang dengan skor 65 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 48 orang dengan skor 192 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 15 orang dengan skor 45 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa selalu melayani masyarakat sesuai prosedur yang ada, dengan skor total adalah 302 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 8 dari tanggapan responden mengenai masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 38 orang dengan skor 152 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa terkadang masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan, dengan skor total adalah 266 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 9 dari tanggapan responden mengenai saya dapat mengendalikan kepentingan pribadi dengan tidak menunda pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 50 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 55 orang dengan skor 220 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 11 orang dengan skor 33 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa mereka dapat mengendalikan kepentingan pribadi dengan tidak menunda pekerjaan, dengan skor total adalah 303 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 10 dari tanggapan responden mengenai ketersediaan dana atau biaya dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 21 orang dengan skor 105 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 55 orang dengan skor 220 memberikan jawaban Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa ketersediaan dana atau biaya dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan skor total adalah 325 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 11 dari tanggapan responden mengenai Kelembagaan di Desa Dapat Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 45 orang dengan skor 180 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 22 orang dengan skor 66 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan

bahwa Kelembagaan di Desa Dapat Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan skor total adalah 291 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 12 dari tanggapan responden mengenai Fasilitas yang Tersedia Memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 37 orang dengan skor 148 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 33 orang dengan skor 99 memberikan jawaban Kurang Setuju, dan sebanyak 6 orang dengan skor 12 memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa masih kurangnya fasilitas yang di miliki oleh setiap desa menyebabkan kurang efektif Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan skor total adalah 259 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 13 dari tanggapan responden mengenai saya merasa nyaman dengan pembagian kerja saat ini. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 55 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 54 orang dengan skor 216 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 11 orang dengan skor 33 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa merasa nyaman dengan pembagian kerja saat ini, dengan skor total adalah 304 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 14 dari tanggapan responden mengenai pemberian masukan dapat memberikan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 19 orang dengan skor 95 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 51 orang dengan skor 204

memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 6 orang dengan skor 18 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa m pemberian masukan dapat memberikan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan skor total adalah 317 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 15 dari tanggapan responden mengenai saya dapat bekerja dengan baik dalam team. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 16 orang dengan skor 80 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 60 orang dengan skor 240 memberikan jawaban Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa mereka dapat bekerja dengan baik dalam team, dengan skor total adalah 320 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Item 16 dari tanggapan responden mengenai adanya pengawasan oleh bpd terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 22 orang dengan skor 88 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 23 orang dengan skor 46 memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa pengawasan oleh bpd terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum efektif, dengan skor total adalah 239 termasuk kategori **Sedang**.

Item 17 dari tanggapan responden mengenai dengan mengikuti program pelatihan, saya lebih mudah memahami tugas baru yang diberikan. Tanggapan

responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 34 orang dengan skor 136 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 7 orang dengan skor 14 memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa dengan mengikuti program pelatihan, mereka lebih mudah memahami tugas baru yang diberikan, walaupun masih ada beberapa aparat desa yang belum pernah mengikuti pelatihan, dengan skor total adalah 269 termasuk kategori **Tinggi**.

Item 18 dari tanggapan responden mengenai saya hadir setiap kali bimtek diadakan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 36 orang dengan skor 144 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 31 orang dengan skor 93 memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 2 orang dengan skor 4 memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa selalu hadir dalam setiap kali bimtek, dengan skor total adalah 276 termasuk kategori **Tinggi**.

4.2.3. Analisa Data Statistik dan Pengujian Hipotesis

Hasil dari olah data statistik dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) didasarkan pada koefisien korelasi modifikasi Harun Al Rasyid untuk masing-masing variabel X dan Y dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

a. Membuat Hasil Persamaan Struktural Jalur

$$Y = 0,306X_1 + 0,216 X_2 + 0,212 X_3 + 0,272$$

- b. Hasil perhitungan untuk koefisien korelasi antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 dengan variabel Y yang disusun dalam matriks korelasi secara rinci pada tabel berikut:

Tabel-13 : Matriks Korelasi antara Variabel X dan Y

Var	X1	X2	X3	Y
X1	1,000	0,322	0,332	0,360
X2	0,322	1,000	0,368	0,351
X3	0,332	0,368	1,000	0,305
Y	0,360	0,351	0,305	1,000

Sumber : Lampiran Hasil olahan data SPSS

- c. Hasil perhitungan untuk koefisien jalur PYX_i , ($i=1,2,3$) secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel-14 Koefisien Jalur PYX

Koefisien jalur X_1 terhadap Y	$(P_{y.x1})$	0,306
Koefisien jalur X_2 terhadap Y	$(P_{y.x2})$	0,216
Koefisien jalur X_3 terhadap Y	$(P_{y.x3})$	0,212
Koefisien Determinasi Multipel	R^2_{y,X_1,X_2,X_3}	0,728
Koefisien Determinasi Var. Luar Terhadap Y	$P_{Y,\epsilon}$	0,272

Sumber : Hasil Olahan data 2019

- d. Berdasarkan pada hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka koefisien jalur dari variabel X_1 , X_2 , X_3 serta variabel luar terhadap variabel Y dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{lll}
 & P_{y.x1} = 0.306 & P_{Y\epsilon} = 0.272 \\
 r_{x1x2} = 0.322 & & \\
 & P_{y.x2} = 0.216 & \\
 r_{x1x3} = 0.332 & & \\
 & P_{y.x3} = 0.212 & \\
 r_{x2x3} = 0.368 & &
 \end{array}$$

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa hubungan korelasional antara Pengetahuan (X_1) dengan Keterampilan (X_2) sebesar 0,322 hasil ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah. Hubungan korelasional antara Pengetahuan (X_1) dengan Etika (X_3) sebesar 0,332 hasil ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah, Hubungan korelasional antara Keterampilan (X_2) dengan Etika (X_3) sebesar 0,368 hasil ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah.

Kemudian sub variabel Pengetahuan (X_1) memiliki koefisien jalur terhadap variabel Efektifitas (Y) sebesar 0,306; sub variabel Keterampilan (X_2) memiliki koefisien jalur terhadap variabel Efektifitas (Y) sebesar 0,216; sub variabel Etika (X_3) memiliki koefisien jalur terhadap variabel Efektifitas (Y) sebesar 0,212; serta adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi Kinerja Organisasi (Y) yang dinyatakan dengan variabel *epselon* (ϵ) sebesar 0,272.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

Dari hasil analisis statistik menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS dan Microsoft Excel 2013, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan, pada tabel berikut:

Tabel-15 : Dekomposisi Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Keterangan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total (%)
X1 Terhadap Y	0.306	-	30.6%
X2 Terhadap Y	0.216	-	21.6%
X3 Terhadap Y	0.212		21.2%
Pengaruh Variabel X1, X2, X3 Terhadap Y			72.8 %

Pengaruh Variabel Luar Terhadap Y	27.2%
TOTAL	100%

Sumber : Hasil Olahan data 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Desa secara *simultan* dapat dijelaskan oleh model sumary atau R square yakni sebesar 72.8%, yang terdiri dari sub variabel Pengetahuan (X_1) sebesar 30.6%, sub variabel Keterampilan (X_2) sebesar 21.6%, sub variabel Etika (X_3) sebesar 21.2%, serta terdapat variabel luar atau model lain yang turut mempengaruhi tetapi tidak diteliti sebesar 27.2%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien determinasi ($R^2_{Y.X_1X_2X_3}$) atau kereratan hubungan kausal variabel X terhadap Y sebesar 72.8%; artinya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara *simultan* dapat dijelaskan oleh model, mengacu pada nilai koefisien determinasi total ($R^2_{Y.X_1X_2X_3}$) atau keeratan hubungan sebesar 72.8%, maka dapat di kategorikan bahwa variabel X mempunyai tingkat pengaruh **"Tinggi"** terhadap variabel Y (berdasarkan tafsiran dari Guilford, 1956:145).

Sedangkan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dilakukan uji kemaknaan signifikansi. Dari hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel-16
Uji Kemaknaan Signifikan Variabel X Terhadap Y

Pengaruh Antar Variabel	Nilai Sig	Alpha(α)	Keputusan
$Y \leftarrow X_1, X_2, X_3$	0,061	0,05	Signifikan
$Y \leftarrow X_1$	0,047	0,05	Signifikan
$Y \leftarrow X_2$	0,041	0,05	Signifikan
$Y \leftarrow X_3$	0,035	0,05	Signifikan

Keterangan :Jika nilai Sig < nilai Alpha (α), maka signifikan.

Sumber : Hasil olahan data 2019, dengan program SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara *simultan* dapat dijelaskan oleh model yang terdiri dari Pengetahuan, Keterampilan, Etika, karena nilai sig ($Y \leftarrow X_1, X_2, X_3$) < nilai alpha (α) ($0,061 < 0,05$). Sub variabel Pengetahuan (X_1) secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y), karena nilai sig ($Y \leftarrow X_1$) > nilai alpha (α) ($0,047 < 0,05$). Sub variabel Keterampilan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y), karena nilai sig ($Y \leftarrow X_2$) < nilai alpha (α) ($0,041 < 0,05$). Sub variabel Etika (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y), karena nilai sig ($Y \leftarrow X_3$) < nilai alpha (α) ($0,035 < 0,05$).

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil analisis koefisien jalur pada tabel 15 menunjukkan bahwa Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, berada pada kategori Tinggi menurut tafsiran Guilford yaitu sebesar 72.8%, sehingga dapat dikatakan telah memberikan pengaruh yang besar karena sisanya yaitu sebesar 27.2% masih dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel Kapasitas Aparatur Desa yang meliputi, Pengetahuan, Keterampilan dan Etika seperti diuraikan berikut :

Pertama dari sub variabel (X1) yakni Pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan wanggarasi yakni sebesar 0.306 atau 30.6%, dan variabel pengetahuan (X1) adalah merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa di banding variabel keterampilan (X2) maupun variabel etika (X3). Hal ini terbukti dari hasil penelitian didapatkan, dari beberapa indikator pertanyaan seperti kemampuan aparatur desa dalam mengingat semua tugas pokok dan fungsi masing-masing, dapat dikatakan sudah efektif, hal ini disebabkan sebagian besar aparat desa di wilayah kecamatan wanggarasi rata-rata adalah tamatan SLTA atau sederajat sehingga mereka memiliki kemampuan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing. begitupula berkaitan dengan pernyataan mengenai dengan pengetahuan yang dimiliki aparatur dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik berdasarkan penelitian sebagian besar aparatur desa memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan dimana aparatur desa selalu dibekali dengan prosedur kerja sehingga memudahkan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya pernyataan mengenai Pengetahuan yang dimiliki aparat, dalam menguasai bidang tugas departement lain atau bidang tugas seperti urusan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa juga sudah efektif, karena hampir semua aparat desa bisa bekerja dalam bidang apapun. Selanjutnya pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki aparat, dapat menguasai bidang tugas yang kerjakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat dikatakan efektif, hal ini terbukti

sebagian besar aparatur dapat menguasai semua bidang tugas yang telah ditentukan di desa masing-masing.

Kedua dari sub variabel (X2) yakni Keterampilan memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan wanggarasi yakni sebesar 0.216 atau 21.6%. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penelitian dari beberapa indikator pernyataan dalam variabel keterampilan seperti memiliki keterampilan dalam menggunakan atau mengoperasikan IT (Komputer/Laptop), sebagian besar Aparat Desa di wilayah kecamatan wanggarasi sudah bisa mengoperasikan computer maupun laptop, meskipun masih terdapat beberapa aparat yang tidak dapat mengoperasikan laptop disebabkan bidang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan IT. Penguasaan IT dalam hal ini kemampuan menggunakan Laptop adalah sangat penting mengingat di perkembangan teknologi dan informasi memaksa semua aparat desa senantiasa bisa mengoperasikan computer atau laptop dalam melaksanakan pekerjaan. Keterampilan seorang aparatur desa sangat dibutuhkan karena dengan aparat desa selalu diperhadapkan dengan permasalahan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa sehingga dibutuhkan seorang aparatur desa yang memiliki kemampuan dan skill dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan sebuah nilai tambah dari hasil yang dikerjakan tersebut maka di butuhkan keterampilan, karena keterampilan adalah suatu kemampuan dalam mempergunakan akal, ide, serta kreatifitas dalam mengerjakan, membuat ataupun mengubah sesuatu menjadi yang lebih bermakna. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa dapat

memudahkan penyelesaian pekerjaan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga dari sub variabel (X3) yakni Etika memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan wanggarasi yakni sebesar 0.212 atau 21.2%. hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian, dari kelima indikator pernyataan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa di wilayah kecamatan wanggarasi memiliki etika yang baik dan dapat dikatakan efektif, hal ini disebabkan seperti dalam hal pencapaian volum kerja yang dihasilkan oleh aparatu desa telah sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, dimana sebagian aparat desa dalam melaksanakan pekerjaan selalu mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas. Selain itu aparat desa di wilayah kecamatan wanggarasi sanggup dan mampu menerima konsekuensi apapun dalam setiap pekerjaan karena sebagian besar aparat desa memiliki tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terutama dalam melakukan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan oleh kepala desa apabila aparat desa yang menyalahgunakan wewenang didapatkan bahwa ada beberapa desa telah menerapkan sanksi kepada aparat desa yang menyalahgunakan wewenang berupa sanksi teguran sampai dengan pemberhentian, tetapi sebagian lagi dari temuan dilapangan biasanya hanya bersifat teguran yang dilakukan oleh kepala desa. Selanjutnya dalam hal kewenangan dan Keleluasaan aparat desa didalam Pengambilan Keputusan, sebagian besar menyatakan tidak memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan disebabkan karena dalam

pengambilan keputusan di hampir semua desa di wilayah kecamatan wanggarasi pasti bermuara pada pimpinan dalam hal ini kepala desa sedangkan aparat desa itu sendiri hanya sebatas menjalankan keputusan kecuali apabila diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur yang meliputi Pengetahuan (X_1), Keterampilan (X_2) dan Etika (X_3) secara *simultan* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 0.728 (72.8%). sedangkan sebesar 0.272 (27.2%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
2. Pengaruh Pengetahuan (X_1), secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.306 (30.6%). Berdasarkan

hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Keterampilan (X_2) secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.216 (21.6%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Etika (X_3) secara *parsial* terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.212 (21.2%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kapasitas aparatur terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di wilayah Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa di wilayah kecamatan wanggarasi senantiasa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dengan diadakannya pelatihan dan pembinaan sesuai apa yang dibutuhkan oleh aparatur desa.
2. Dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kecamatan Wanggarasi agar dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.
3. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah kapasitas aparatur pada level individual seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Faktor-faktor lain yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Radja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Kencana S. Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumorotomo Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Jakarta: Rafika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI Nawawi, Zaidan.
2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Erlangga.
- Robbin, Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi 10*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Rohdewohld R. 2004. *Building Capacity to Support Decentralisation the Case of Indonesia*, Tokyo: Tokyo Symposium on Capacity Development.
- Said, Masud.M. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyawan. 2004. *Pembangunan Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Mas.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sudarmo, Gito dan Mulyono, Agus. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Soeprapto Riyadi. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, World Bank.

- Sondang P. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan. Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Ulbersilalahi. 2002. *Pemahaman Praktik Asas Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju
- Umar, Husaein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

L

A

M

P

I

R

A

N

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo Kampus 2 Pohuwato Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Nama : Rahmawati Ladiku

Dalam kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian saat ini berterima kasih sebelumnya atas partisipasi anda dalam pembuatan/penulisan skripsi sebagai tugas akhir kuliah saya di Universitas Ichsan Gorontalo. Sehingga pada kesempatan ini saya meminta kesediaan Anda sebagai aparatur desa di kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato untuk menjawab kuesioner yang saya ajukan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada **“Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa”**.

Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan ilmiah, sehingga semua jawaban Anda akan kami jaga kerahasiaannya. Agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan maka dalam kuesioner ini tidak perlu mencantumkan nama. Atas kesediaan dan kerjasama Anda, saya ucapkan terima kasih.

Pohuwato, 2019

Rahmawati Ladiku

A. IDENTITAS RESPONDEN :

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang [X] pada kotak yang disediakan.

1. Jenis kelamin Anda:

[1] Pria

[2] Wanita

2. Berapakah usia Anda:

[1] 20-35 tahun

[2] 35-45 tahun

[3] >45 tahun

3. Tingkat pendidikan terakhir Anda:

[1] SLTA/ Sederajat

[2] Diploma

[3] S1

[4] Lainnya:

4. Sudah berapa lama Anda bekerja:

[1] 1-2 tahun

[2] 2-4 tahun

[3] 4-6 tahun

[4] >6 tahun

5. Apakah unit/divisi kerja yang Anda tempati sekarang? _____

Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, perhatikan keterangan berikut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

B. PERTANYAAN KAPASITAS APARATUR (X)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Indikator Pengetahuan						
1	Saya Mampu Mengingat Semua Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Pekerjaan					
2	Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya Mampu Melaksanakan Pekerjaan dengan Baik					
3	Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya Dapat Menguasai Bidang Tugas Departement Lain					
4	Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya Lebih Menguasai Bidang Tugas yang Saya Kerjakan					
Indikator Keterampilan						
5	Saya Memiliki Keterampilan dalam Menggunakan atau Mengoprasikan IT (Komputer/Laptop)					
6	Dengan Keterampilan Saya dalam Penggunaan Komputer, Dapat Memperlancar Pekerjaan					
7	Saya Handal dalam Melaksanakan Prosedur Kerja					
8	Saya Senantiasa Bersiskusi dalam Melakukan Pekerjaan					
9	Keterampilan yang Saya Miliki Sesuai dengan Pekerjaan yang Saya Kerjakan					
Indikator Etika						
10	Tingkat Pencapaian Volum Kerja yang Saya Hasilkan Telah Sesuai dengan Harapan yang Telah Ditentukan					
11	Saya Sanggup Menerima Konsekuensi Apapun dalam Melaksanakan Pekerjaan					
12	Saya Mendahulukan Pekerjaan-pekerjaan yang Merupakan Prioritas Kerja					
13	Terdapat Sanksi untuk Aparatur yang Menyalahgunakan Wewenang					

14	Saya diberi Kewenangan dan Keleluasaan didalam Pengambilan Keputusan					
-----------	--	--	--	--	--	--

B. EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Y)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Indikator Kepastian Hukum						
1	Dengan Adanya Pedoman Kerja, Saya Dapat Melaksanakan Tugas dengan Baik					
2	Saya Selalu Datannng Ke Kantor dengan Tepat Waktu					
3	Peraturan yang Diberikan Membatasi Saya dalam Berperilaku					
Indikator Kebijakan dan Praktik Manajemen						
4	Setiap Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telah Terorganisir Sesuai Tujuan yang Telah Dibuat					
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Didukung dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia					
6	Potensi Desa Dimanfaatkan dengan Baik					
Indikator Penyelenggraraan kepentingan umum						
7	Saya Melayani Masyarakat Sesuai Prosedur yang Ada					
8	Masyarakat Mengeluh Dengan Pelayanan yang Diberikan					
9	Saya Dapat Mengendalikan Kepentingan Pribadi dengan Tidak Menunda Pekerjaan					
Indikator Tersedianya sarana dan prasarana						
10	Ketersediaan Dana atau Biaya Dapat Memperlancar Pelaksanaan Penyelenggaraan					

	Pemerintahan Desa					
11	Kelembagaan di Desa Dapat Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
12	Fasilitas yang Tersedia Memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
Indikator Koordinasi dan kesatuan arah						
13	Saya Merasa Nyaman dengan Pembagian Kerja Saat Ini					
14	Pemberian Masukan Dapat Memberikan Solusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
15	Saya Dapat Bekerja Dengan Baik Dalam Team					

Indikator System pengawasan dan pengendalian						
16	Adanya Pengawasan Oleh BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
17	Dengan Mengikuti Program Pelatihan, Saya Lebih Mudah Memahami Tugas Baru yang Diberikan					
18	Saya Hadir Setiap Kali Bimtek Diadakan					


```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3.

```

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	70.11	3.139	76
Pengetahuan	16.59	1.122	76
Keterampilan	19.33	1.370	76
Etika	19.28	1.771	76

Correlations

		Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pengetahuan	Keterampilan	Etika
Pearson Correlation	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.000	.322	.332	.360
	Pengetahuan	.322	1.000	.368	.351
	Keterampilan	.332	.368	1.000	.305
	Etika	.360	.351	.305	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	.	.426	.391	.183
	Pengetahuan	.426	.	.281	.196
	Keterampilan	.391	.281	.	.184
	Etika	.083	.196	.184	.
N	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	76	76	76	76
	Pengetahuan	76	76	76	76
	Keterampilan	76	76	76	76
	Etika	76	76	76	76

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Etika, Keterampilan, Pengetahuan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.667 ^a	.728	.213	3.159	.028	.690	3	72	.061

a. Predictors: (Constant), Etika, Keterampilan, Pengetahuan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.664	3	6.888	.690	.061 ^b
	Residual	718.494	72	9.979		
	Total	739.158	75			

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Predictors: (Constant), Etika, Keterampilan, Pengetahuan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.060	8.144		8.111	.000
	Pengetahuan	.319	.130	.306	.391	.047
	Keterampilan	.217	.169	.216	.099	.041
	Etika	.224	.110	.212	1.402	.035

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

		Correlations				
		P1	P2	P3	P4	Total
P1	Pearson Correlation	1	.113	.013	.079	.449**
	Sig. (2-tailed)		.329	.910	.497	.000
	N	76	76	76	76	76
P2	Pearson Correlation	.113	1	-.005	.269*	.616**
	Sig. (2-tailed)	.329		.964	.019	.000
	N	76	76	76	76	76
P3	Pearson Correlation	.013	-.005	1	.193	.582**
	Sig. (2-tailed)	.910	.964		.094	.000
	N	76	76	76	76	76
P4	Pearson Correlation	.079	.269*	.193	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.497	.019	.094		.000
	N	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.449**	.616**	.582**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 Total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	76	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	28.99	4.386	.289	.709
P2	29.17	3.850	.435	.664
P3	29.07	3.876	.377	.681
P4	28.92	3.940	.509	.651
Total	16.59	1.258	1.000	.320

```

FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 Total
  /STATISTICS=MEAN
  /PIECHART FREQ
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Statistics

		P1	P2	P3	P4	Total
N	Valid	76	76	76	76	76
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.20	4.01	4.12	4.26	16.59

Frequency Table

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	61	80.3	80.3	80.3
	Sangat Setuju	15	19.7	19.7	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	13.2	13.2	13.2
	Setuju	55	72.4	72.4	85.5
	Sangat Setuju	11	14.5	14.5	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	8	10.5	10.5	10.5
	Setuju	51	67.1	67.1	77.6
	Sangat Setuju	17	22.4	22.4	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

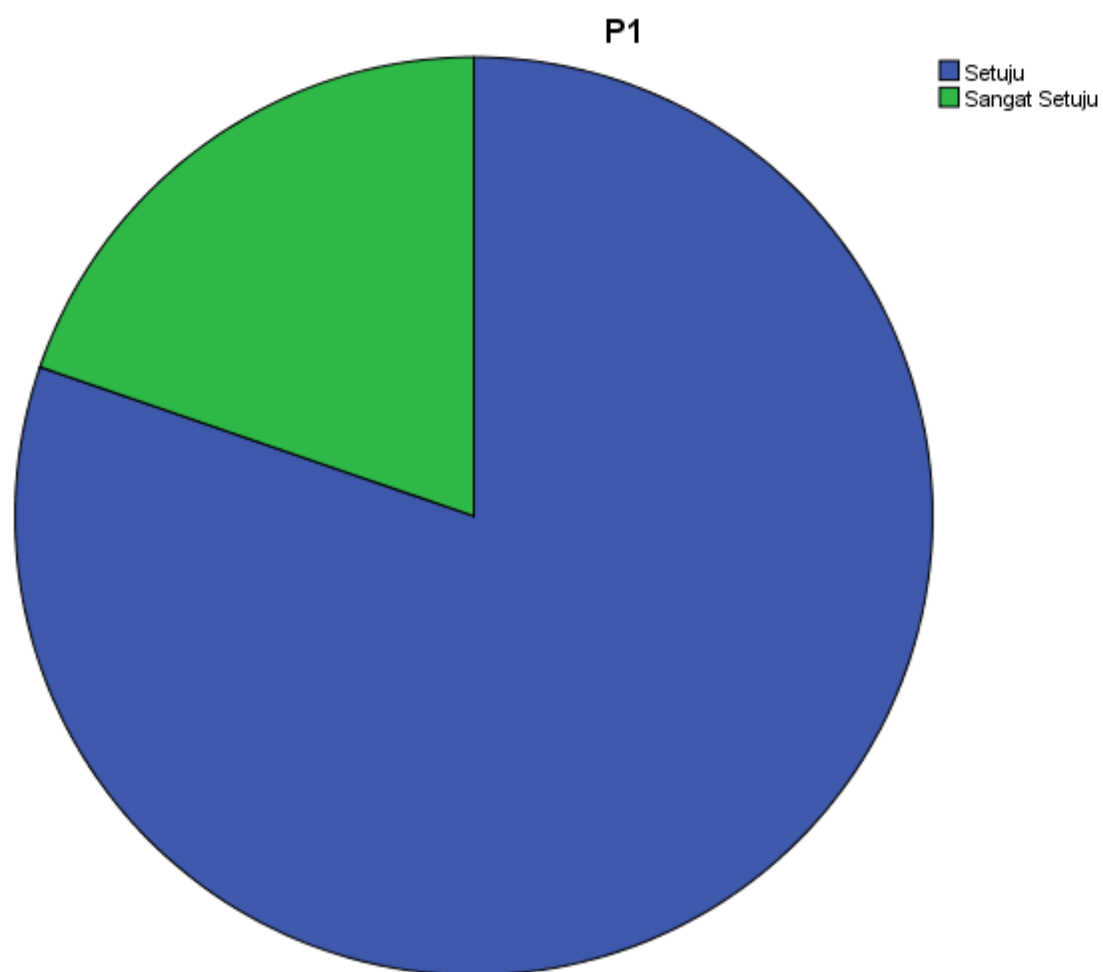
P4

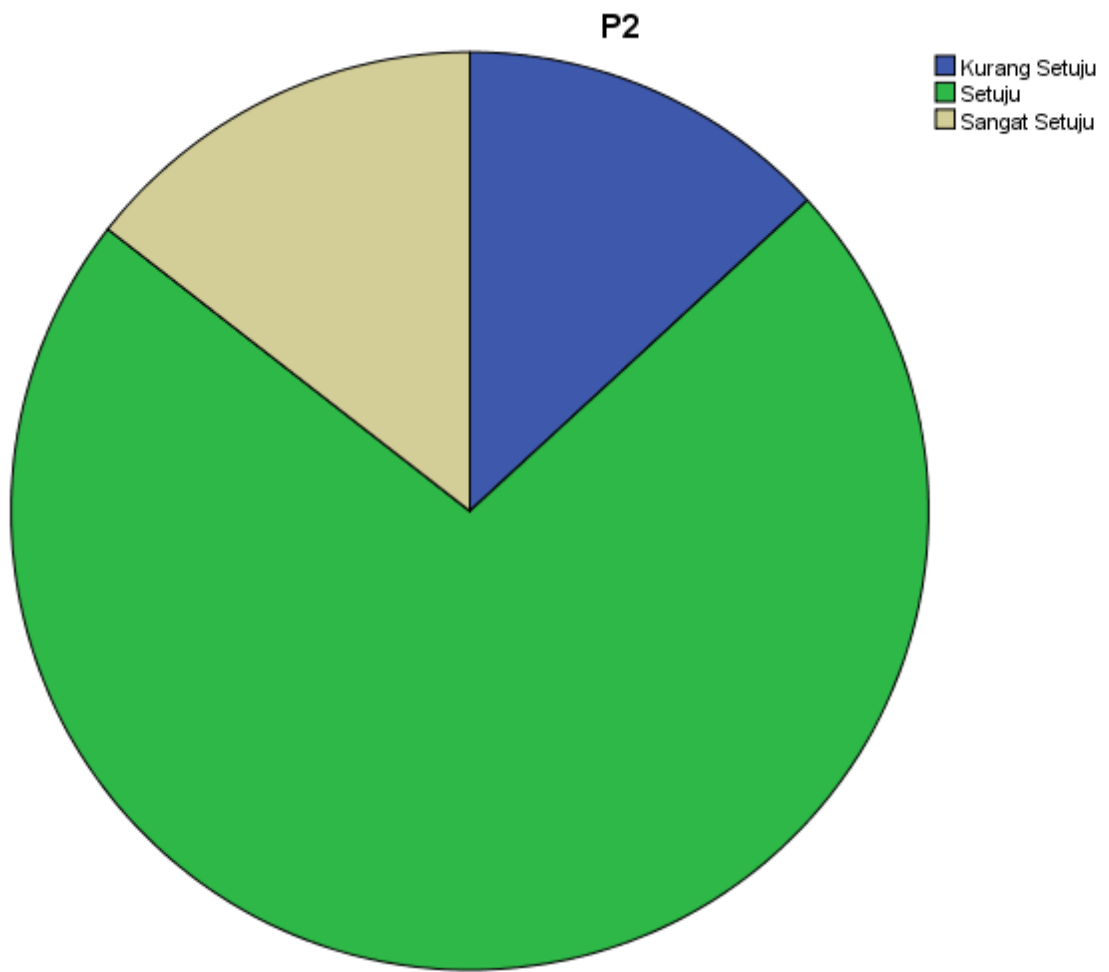
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	56	73.7	73.7	73.7
	Sangat Setuju	20	26.3	26.3	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

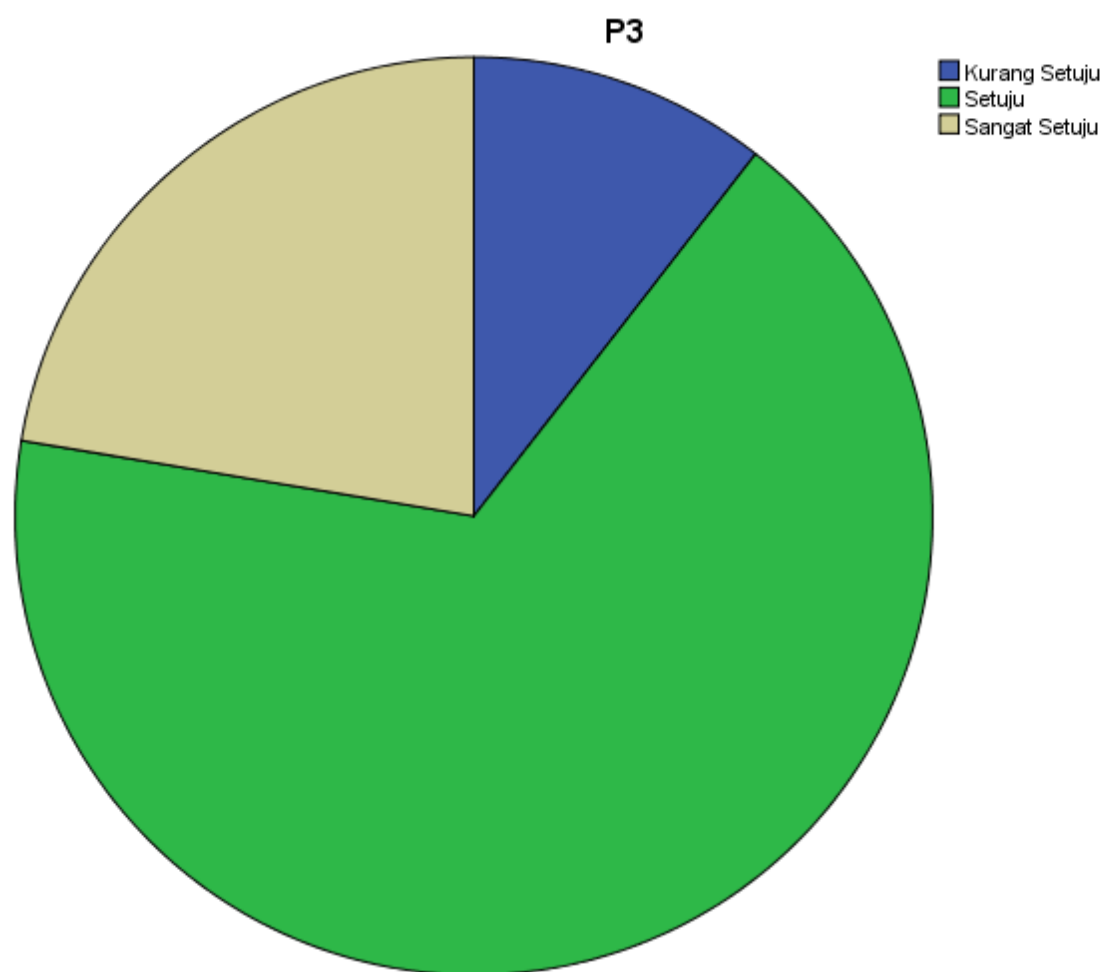
Total

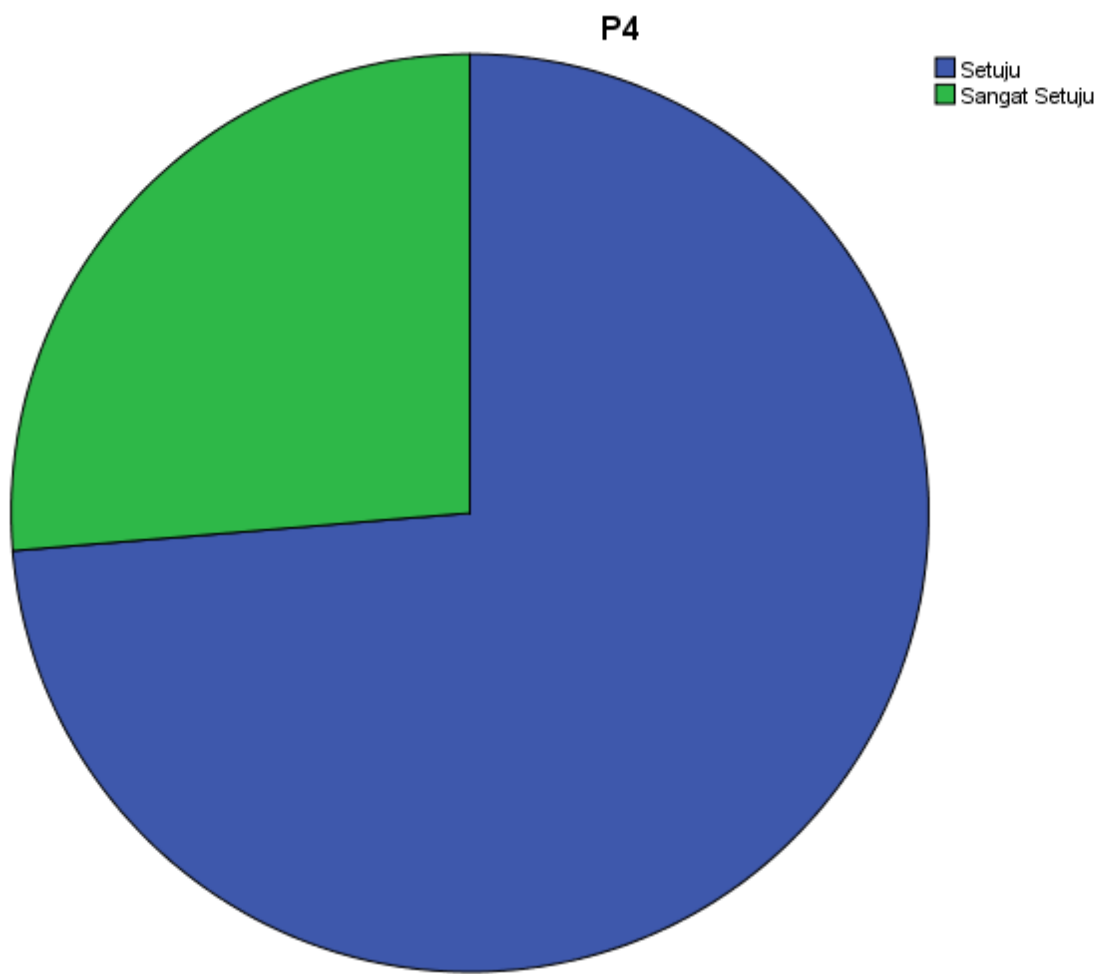
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	2	2.6	2.6	2.6
	15	8	10.5	10.5	13.2
	16	28	36.8	36.8	50.0
	17	24	31.6	31.6	81.6
	18	9	11.8	11.8	93.4
	19	5	6.6	6.6	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

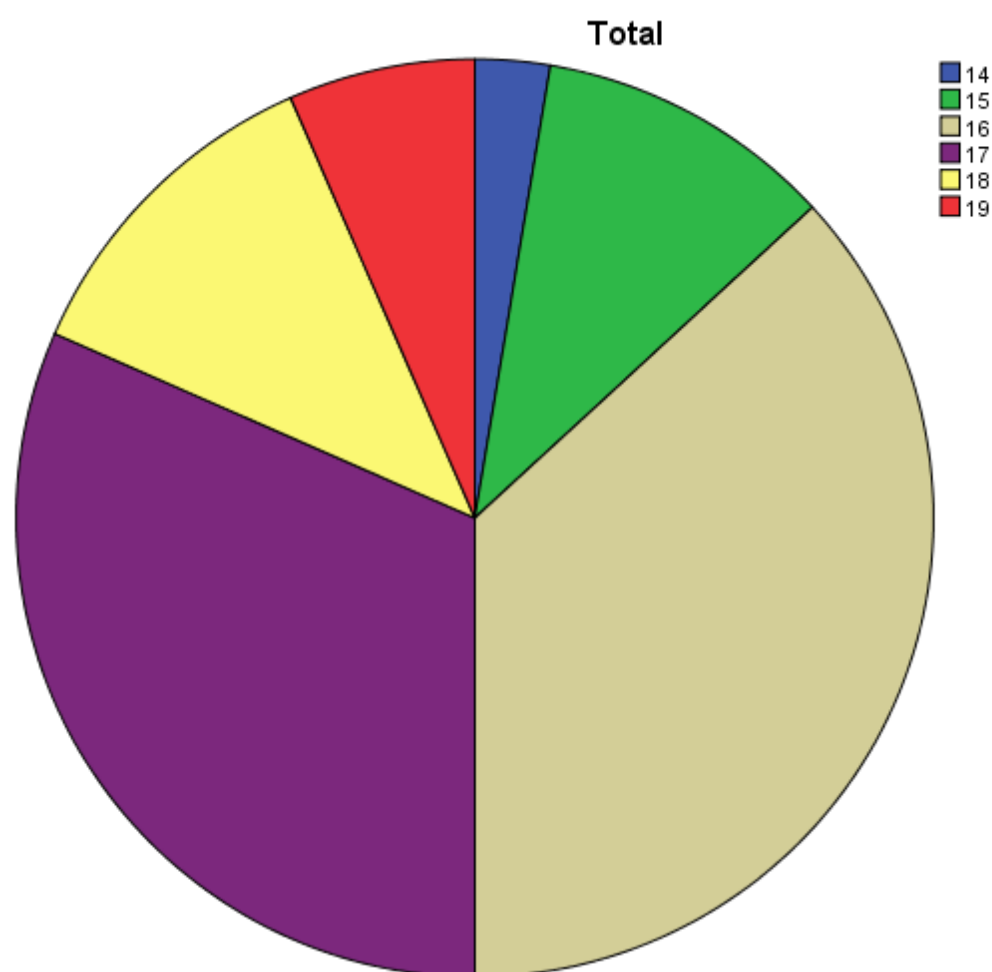
Pie Chart











```

CORRELATIONS
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	-.175	.185	-.133	-.156	.457**
	Sig. (2-tailed)		.130	.109	.252	.177	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P2	Pearson Correlation	-.175	1	-.053	.309**	-.148	.452**
	Sig. (2-tailed)	.130		.649	.007	.203	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P3	Pearson Correlation	.185	-.053	1	-.093	-.131	.397**
	Sig. (2-tailed)	.109	.649		.425	.261	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P4	Pearson Correlation	-.133	.309**	-.093	1	.159	.464**
	Sig. (2-tailed)	.252	.007	.425		.171	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P5	Pearson Correlation	-.156	-.148	-.131	.159	1	.323**
	Sig. (2-tailed)	.177	.203	.261	.171		.004
	N	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.457**	.452**	.397**	.464**	.323**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	
	N	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	76	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.543	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	35.08	6.127	.174	.549
P2	34.97	6.213	.195	.537
P3	34.89	6.602	.204	.532
P4	34.37	6.556	.318	.507
P5	34.64	6.765	.078	.577
Total	19.33	1.877	1.000	-.236 ^a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```

FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
  /STATISTICS=MEAN
  /PIECHART FREQ
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Statistics

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
N	Valid	76	76	76	76	76	76
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.58	3.68	3.76	4.29	4.01	19.33

Frequency Table

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	11.8	11.8	11.8
	Kurang Setuju	21	27.6	27.6	39.5
	Setuju	39	51.3	51.3	90.8
	Sangat Setuju	7	9.2	9.2	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	5.3	5.3	5.3
	Kurang Setuju	25	32.9	32.9	38.2
	Setuju	38	50.0	50.0	88.2
	Sangat Setuju	9	11.8	11.8	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	23	30.3	30.3	30.3
	Setuju	48	63.2	63.2	93.4
	Sangat Setuju	5	6.6	6.6	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	54	71.1	71.1	71.1
	Sangat Setuju	22	28.9	28.9	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

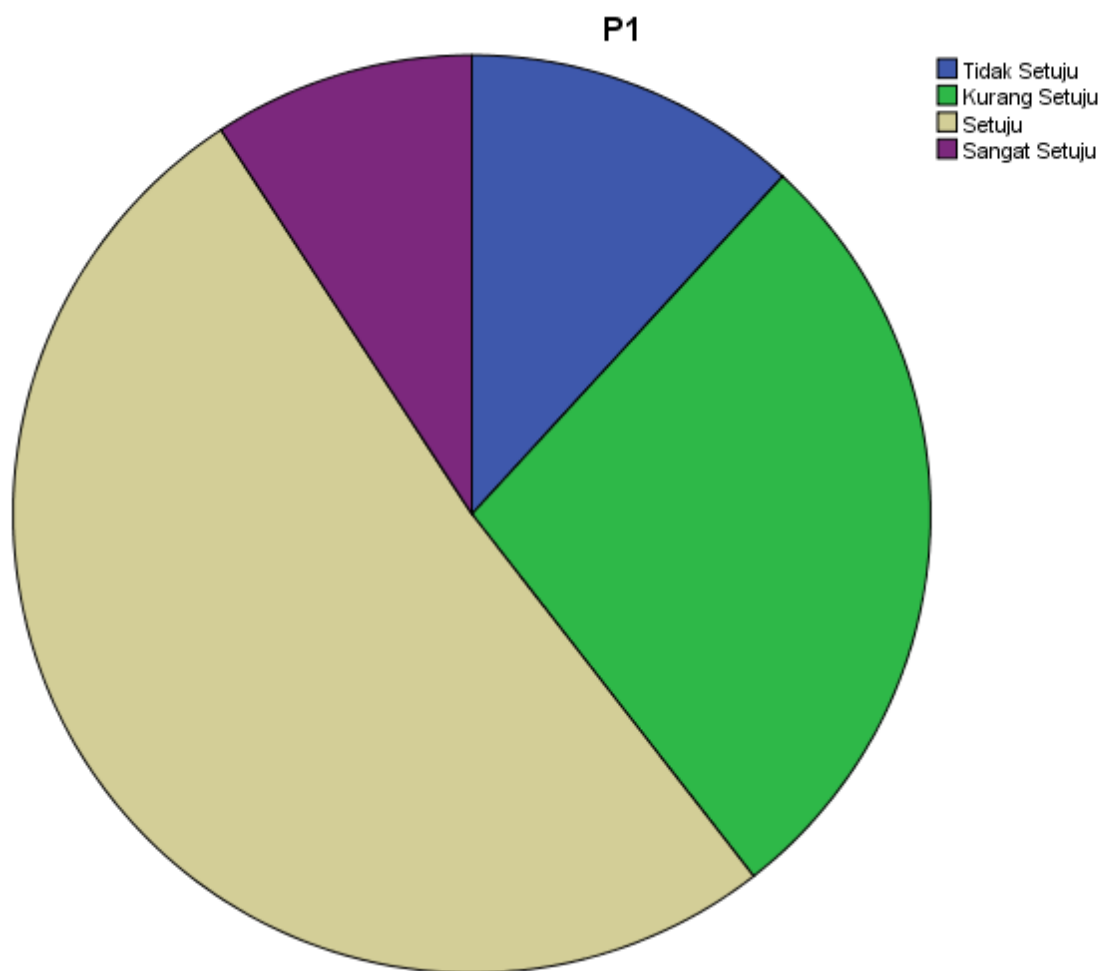
P5

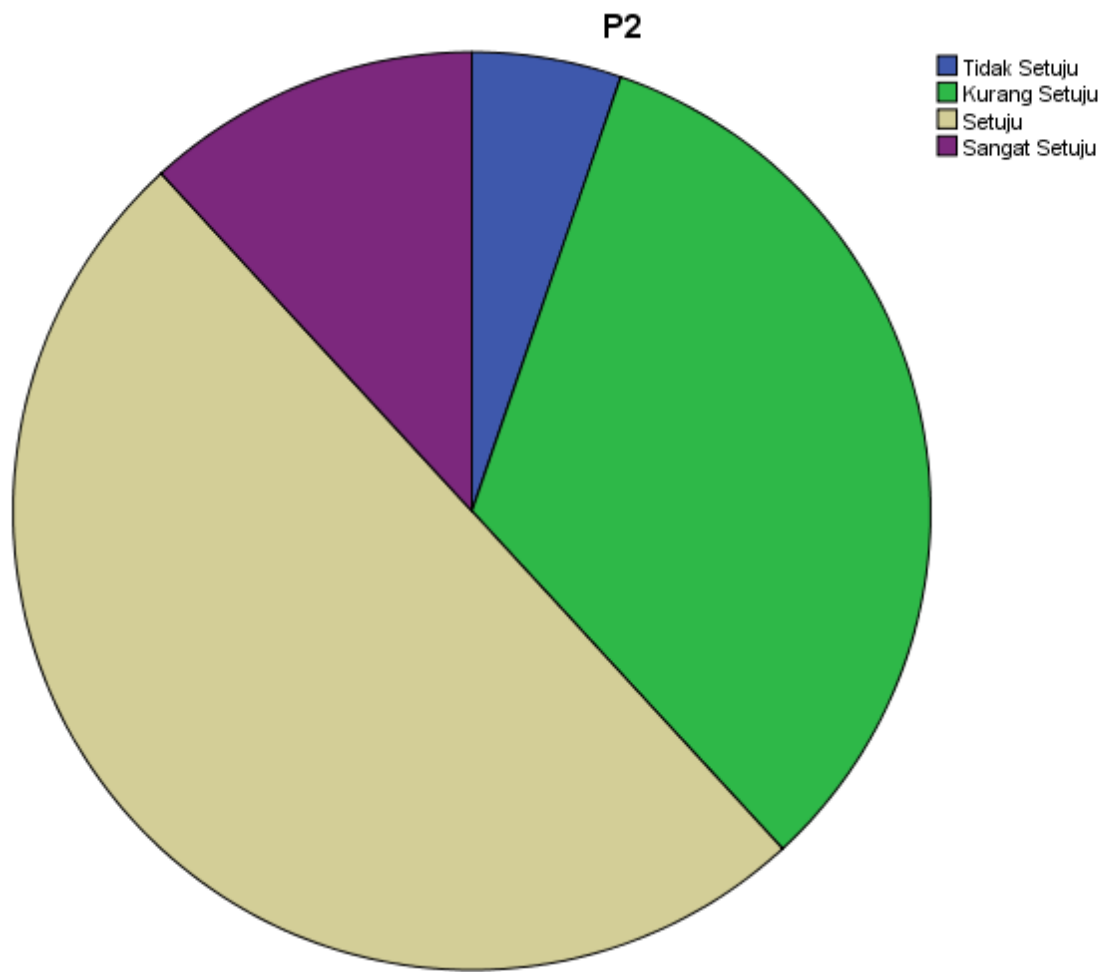
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	17	22.4	22.4	22.4
	Setuju	41	53.9	53.9	76.3
	Sangat Setuju	18	23.7	23.7	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

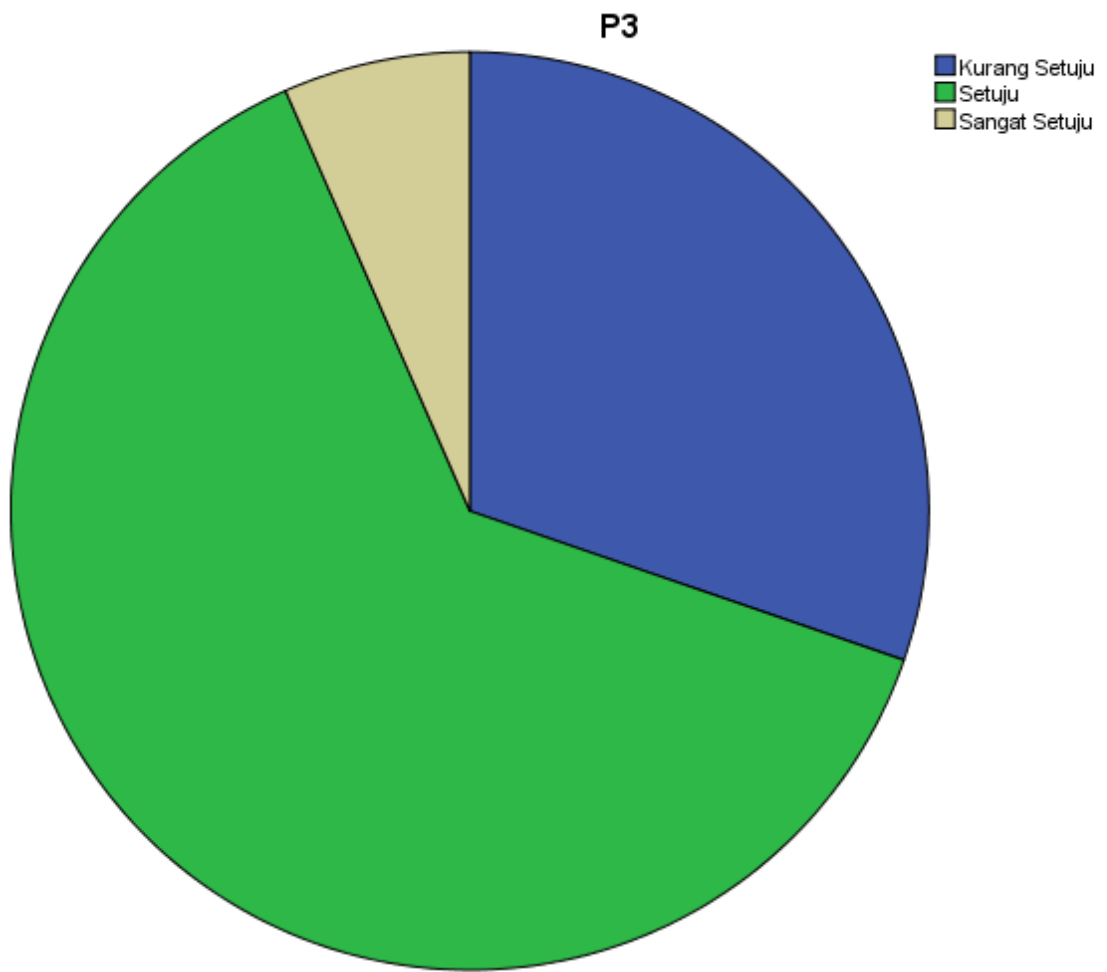
Total

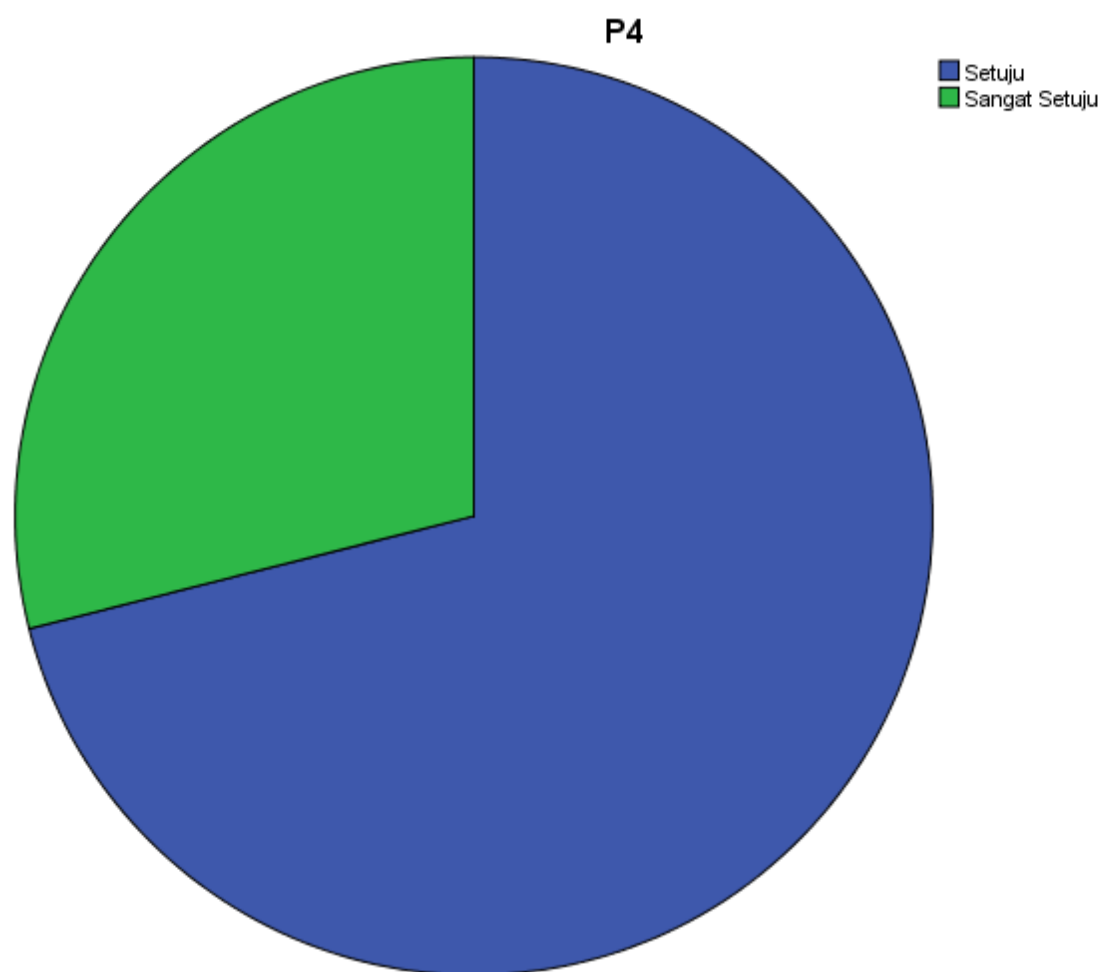
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16	1	1.3	1.3	1.3
	17	7	9.2	9.2	10.5
	18	13	17.1	17.1	27.6
	19	18	23.7	23.7	51.3

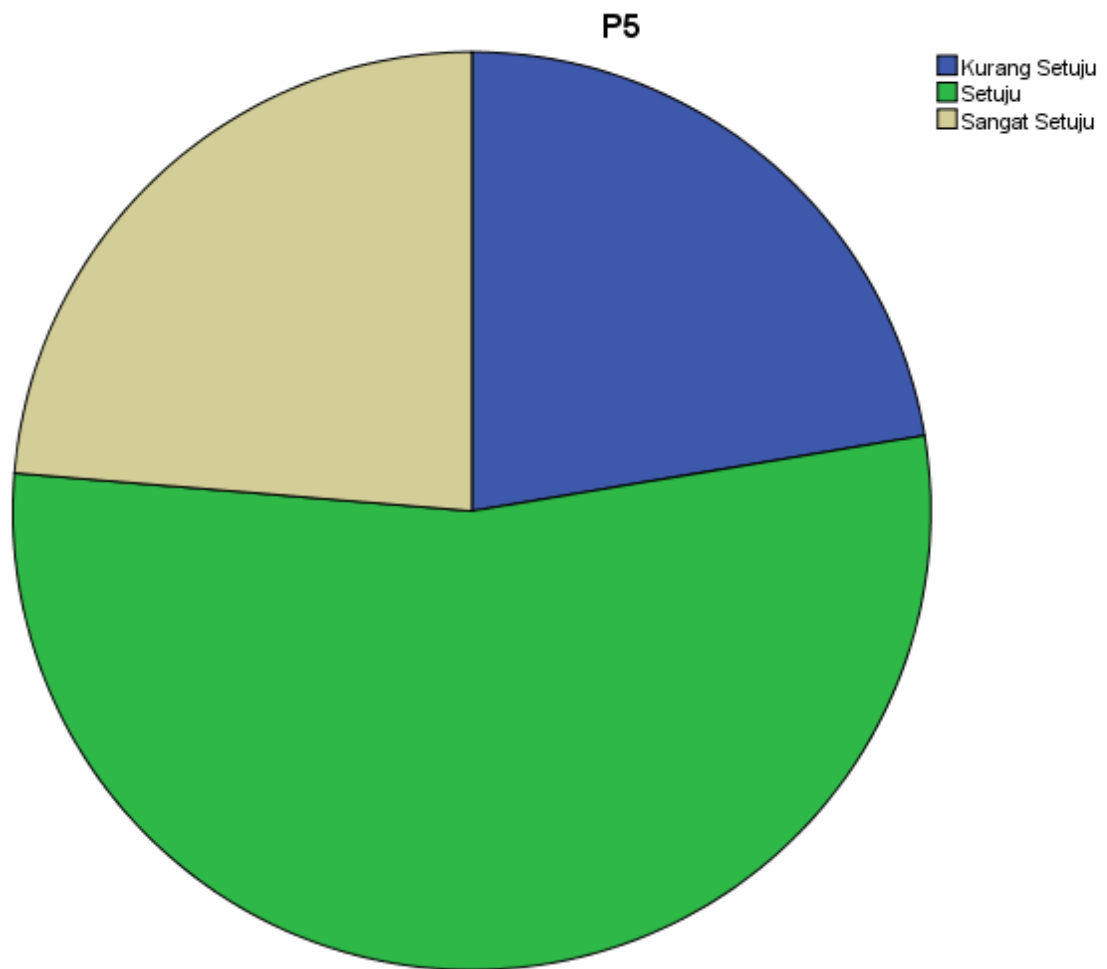
20	23	30.3	30.3	81.6
21	10	13.2	13.2	94.7
22	4	5.3	5.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

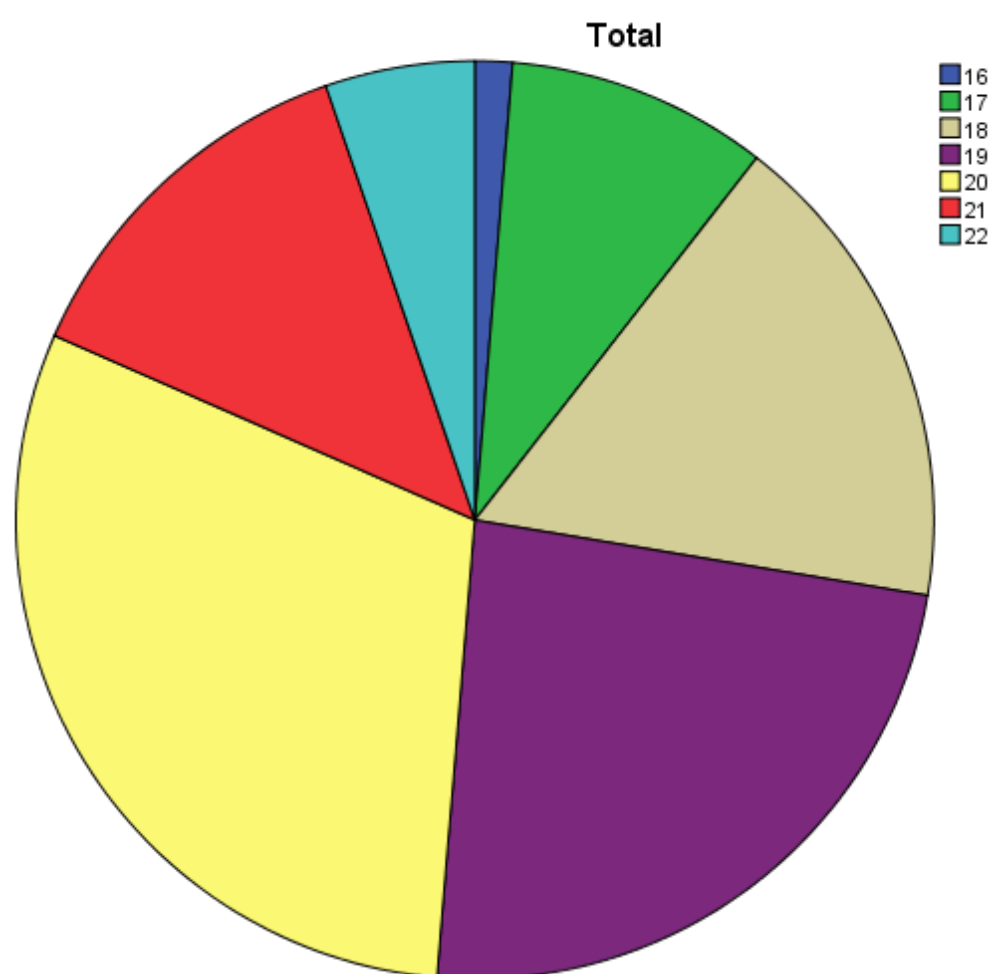
Pie Chart











```

CORRELATIONS
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.139	-.386**	-.009	.197	.369**
	Sig. (2-tailed)		.232	.001	.942	.088	.001
	N	76	76	76	76	76	76
P2	Pearson Correlation	.139	1	-.041	-.025	.270*	.525**
	Sig. (2-tailed)	.232		.727	.828	.018	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P3	Pearson Correlation	-.386**	-.041	1	.204	-.011	.306**
	Sig. (2-tailed)	.001	.727		.078	.924	.007
	N	76	76	76	76	76	76
P4	Pearson Correlation	-.009	-.025	.204	1	-.128	.486**
	Sig. (2-tailed)	.942	.828	.078		.269	.000
	N	76	76	76	76	76	76
P5	Pearson Correlation	.197	.270*	-.011	-.128	1	.624**
	Sig. (2-tailed)	.088	.018	.924	.269		.000
	N	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.369**	.525**	.306**	.486**	.624**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.007	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	76	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	34.38	11.279	.199	.632
P2	34.34	10.575	.375	.591
P3	34.47	11.559	.128	.648
P4	34.99	10.306	.265	.615
P5	35.30	9.307	.421	.561
Total	19.28	3.136	1.000	.113

```
FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/STATISTICS=MEAN
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.
```

Statistics

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
N	Valid	76	76	76	76	76	76
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.17	4.21	4.08	3.57	3.25	19.28

Frequency Table

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	10	13.2	13.2	13.2
	Setuju	43	56.6	56.6	69.7
	Sangat Setuju	23	30.3	30.3	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	11.8	11.8	11.8
	Setuju	42	55.3	55.3	67.1
	Sangat Setuju	25	32.9	32.9	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	13	17.1	17.1	17.1
	Setuju	44	57.9	57.9	75.0
	Sangat Setuju	19	25.0	25.0	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	11.8	11.8	11.8
	Kurang Setuju	25	32.9	32.9	44.7
	Setuju	32	42.1	42.1	86.8
	Sangat Setuju	10	13.2	13.2	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

P5

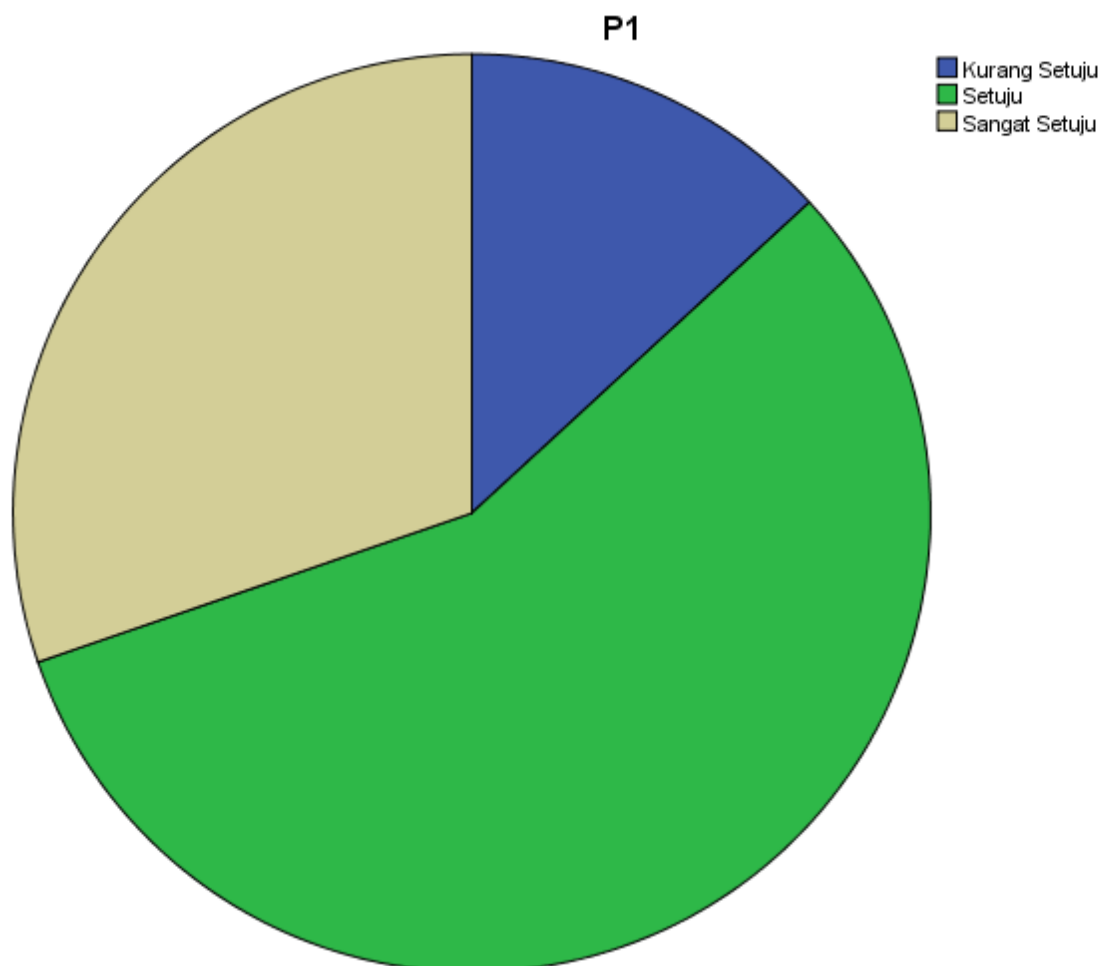
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	19	25.0	25.0	25.0
	Kurang Setuju	25	32.9	32.9	57.9
	Setuju	26	34.2	34.2	92.1
	Sangat Setuju	6	7.9	7.9	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

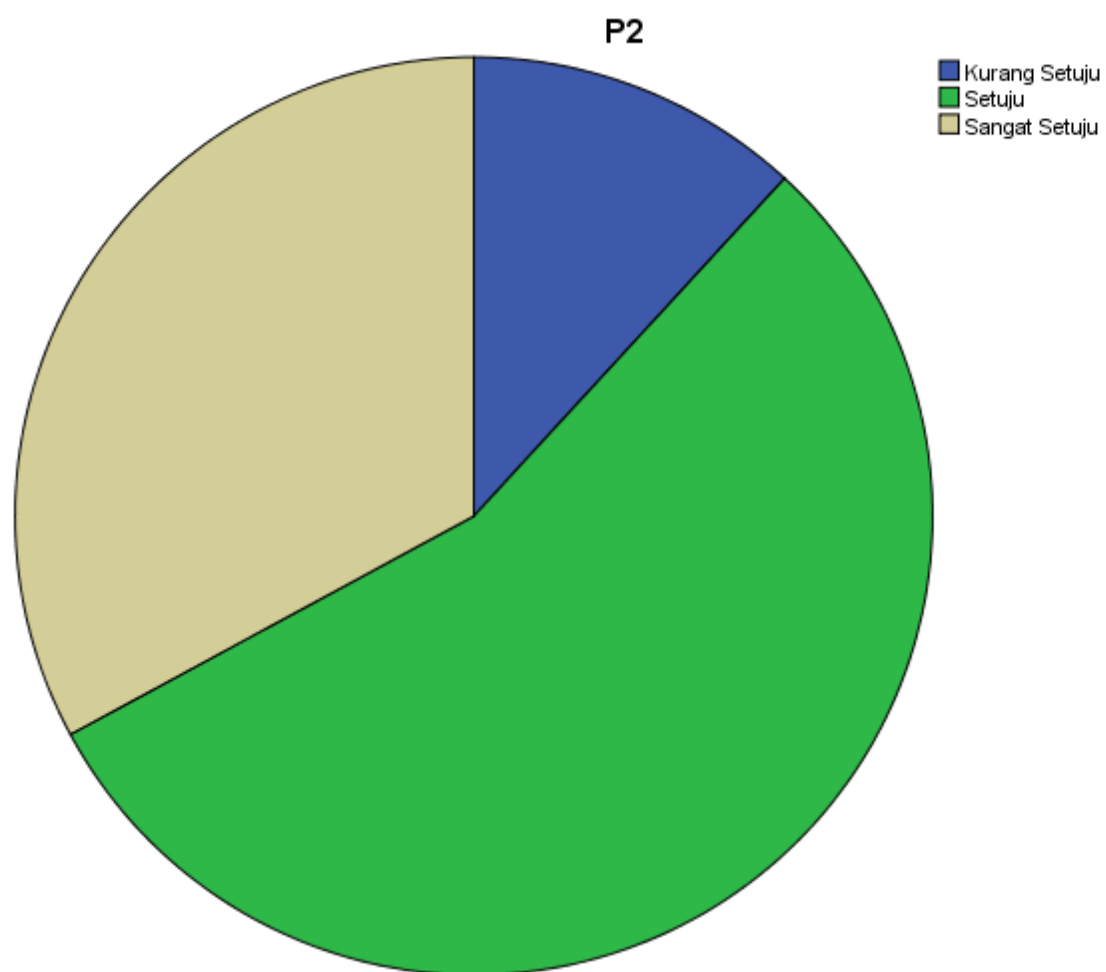
Total

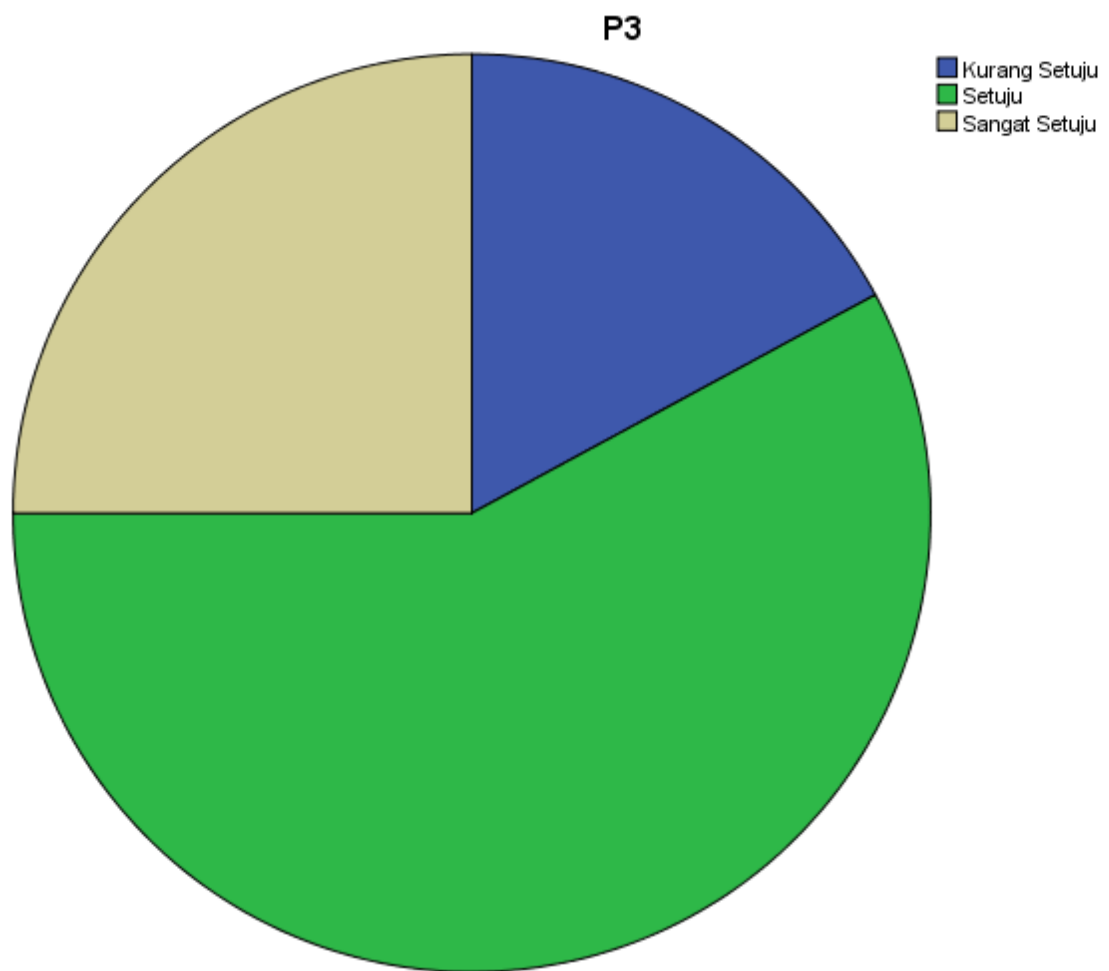
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16	3	3.9	3.9	3.9
	17	10	13.2	13.2	17.1
	18	13	17.1	17.1	34.2

19	18	23.7	23.7	57.9
20	13	17.1	17.1	75.0
21	11	14.5	14.5	89.5
22	6	7.9	7.9	97.4
24	2	2.6	2.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Pie Chart







P4

